

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PER.05/MEN.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan perlunya pemantauan terhadap perkembangan dan proses pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas. Pemantauan merupakan suatu pengamatan dan/atau pencermatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala untuk menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program/kegiatan. Selain itu juga mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan merumuskan tindak lanjut yang dibutuhkan.

Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh setiap penanggung jawab kegiatan, diharapkan hasilnya dapat berguna untuk menentukan tingkat pencapaian dan optimalisasi kapasitas program/kegiatan. Selain itu, hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai bahan masukan penyusunan laporan evaluasi kinerja dan bahan penyempurnaan penyusunan perencanaan dalam keberlangsungan program/kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas, bahwa setiap unit kerja sebagai pelaksana kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan (*self monitoring*). Hasil pemantauan tersebut disampaikan kepada Biro Perencanaan Organisasi dan Tatalaksana untuk disusun sebagai Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas setiap triwulan. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas Triwulan IV Tahun 2015 akan menggambarkan hasil realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran sampai dengan Desember 2015.

## **B. TUJUAN**

Tujuan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, baik fisik maupun keuangan dalam rangka menjamin konsistensi antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan, baik terhadap tingkat perkembangan pelaksanaannya maupun manfaat yang ditargetkan dan hambatan atau kendala yang terjadi untuk diambil tindakan korektif sedini mungkin.
3. Untuk mendukung usaha penyempurnaan perencanaan berikutnya dengan menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efisien dan efektif.

## **C. DASAR PEMANTAUAN**

Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas dilakukan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
2. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri Hibah
3. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PER.05/MEN.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Nomor 02/M.PPN/06/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri Di Kementerian Negara PPN/Bappenas

5. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas.
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014.
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah di Kementerian PPN/Bappenas
8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.49/M.PPN/HK/03/2015 tentang perubahan keempat atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/M.PPN/HK/12/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA SATKER) Kementerian PPN/Bappenas.
9. Petunjuk Pelaksanaan Sesmen PPN/Sestama No. 1/Juklak/Sesmen/02/2014 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas
10. Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-055.01.1.017312/2015 untuk Satker Kementerian PPN/Bappenas dan DIPA-055.01.1.966009/2015 untuk Satker Pengelola Hibah MCC.

#### **D. METODOLOGI PEMANTAUAN**

Laporan hasil pemantauan disusun sesuai dengan ketentuan dasar tersebut di atas dengan melakukan analisis deskriptif berdasarkan tabulasi/hasil pengolahan data realisasi penyerapan anggaran yang disampaikan Biro Umum berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selain itu juga diperoleh data dari seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menggambarkan rencana penarikan anggaran dan menjelaskan mengenai hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program/kegiatan dan proses pencairan dana.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

#### **KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2015**

#### **A. STRUKTUR PROGRAM DAN PENGELOLAAN ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

##### **1. Struktur Program Kementerian PPN/Bappenas**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

##### a. Program Teknis

Program Perencanaan Pembangunan Nasional.

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.

##### b. Program Generik

1) Program Generik 1: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

2) Program Generik 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3) Program Generik 3: Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Dari berbagai program tersebut telah dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan baik yang mendukung tugas-tugas utama maupun tugas pendukung dalam melaksanakan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas.

##### **2. Struktur Pengelolaan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas**

Struktur pengelolaan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan oleh 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja (Satker), yaitu 1 Satker Utama pada tingkat Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Sesmen PPN/Sestama Bappenas), 1 Satker Pengelolaan Hibah *Millenium Challenge Corporation* (MCC), 1 Satker Majelis Wali Amanat dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF), dan 34 Satker pelaksanaan dana dekonsentrasi di setiap provinsi. Satker Utama Setmen PPN/Settama Bappenas tersebut merupakan

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang dibantu oleh satu bendaharawan pengeluaran anggaran dan satu Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), serta beberapa orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), baik PPK Program maupun PPK yang berada di setiap Unit Kerja Eselon I (UKE I) atau Kedeputian. Selain itu, pada setiap PPK dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pejabat Pengadaan.

Susunan pengelola anggaran di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.49/M.PPN/HK/03/2015 tentang perubahan keempat atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/M.PPN/HK/12/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA SATKER) Kementerian PPN/Bappenas.

Seperti telah dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015 terdiri dari 4 (empat) program, yaitu:

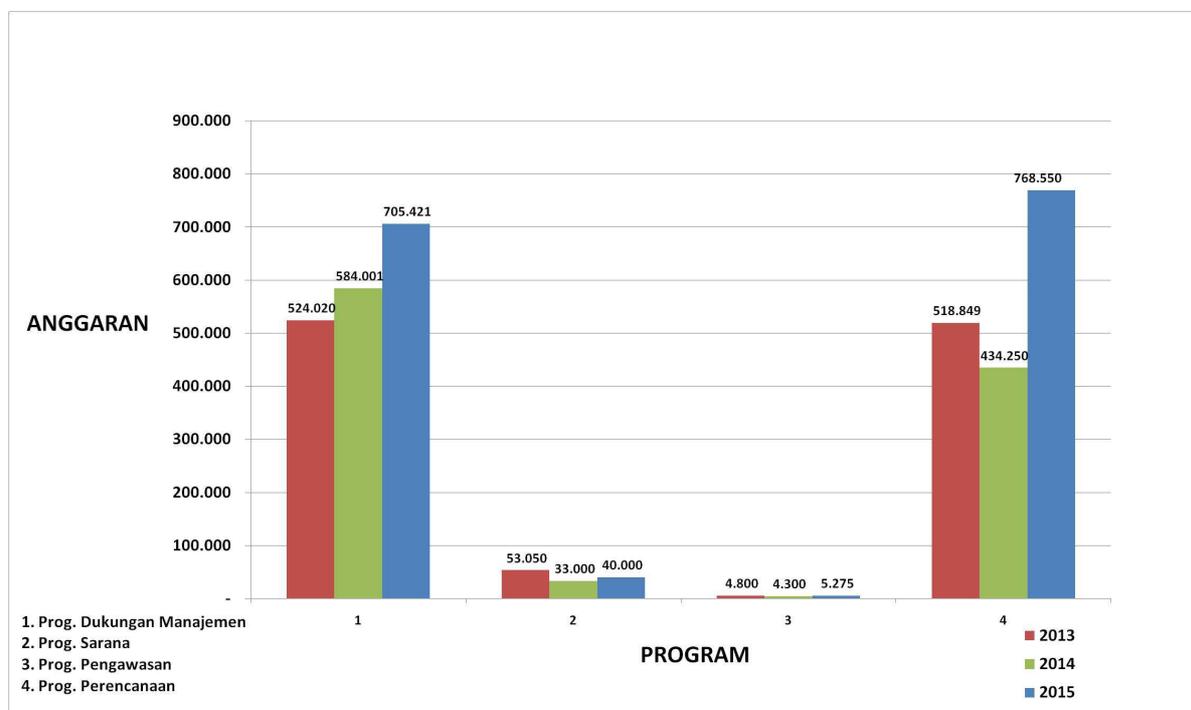
- 1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dikelola oleh 13 (tiga belas) PPK Kedeputian di lingkungan UKE I (Kedeputian), dan oleh 34 Satker di 34 provinsi.
- 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, yang dikelola oleh 5 (lima) PPK di Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas (Setmen PPN/Settama Bappenas).
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bappenas, yang dikelola oleh 1 (satu) PPK di Setmen PPN/Settama Bappenas.
- 4) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, yang dikelola oleh 1 (satu) orang PPK di Inspektorat Utama.

Dalam proses pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran, pengelola anggaran dan unit kerja pelaksana kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas serta Petunjuk Pelaksanaan No. 2/Juklak/Sesmen/03/2014. Dengan struktur pengelolaan anggaran tersebut diharapkan pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan, dan pelaporan realisasi penyerapan anggaran akan menjadi suatu sinergi yang positif sehingga ada sinkronisasi antar struktur program dan kegiatan dengan struktur organisasinya.

## B. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2015

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, pada tahun anggaran 2015 Kementerian PPN/Bappenas mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1.519.246.983.000,- yang terdiri dana rupiah murni (RM) sebesar Rp. 659.158.063.000,-, pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp. 404.360.101.000,- dan hibah luar negeri (HLN) sebesar Rp. 455.728.819.000,-. Berikut pada Gambar 1 terlihat perbandingan alokasi dana tahun 2013-2015.

**GAMBAR 1**  
**ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
**TAHUN 2013-2015**



Sumber : Pagu DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015

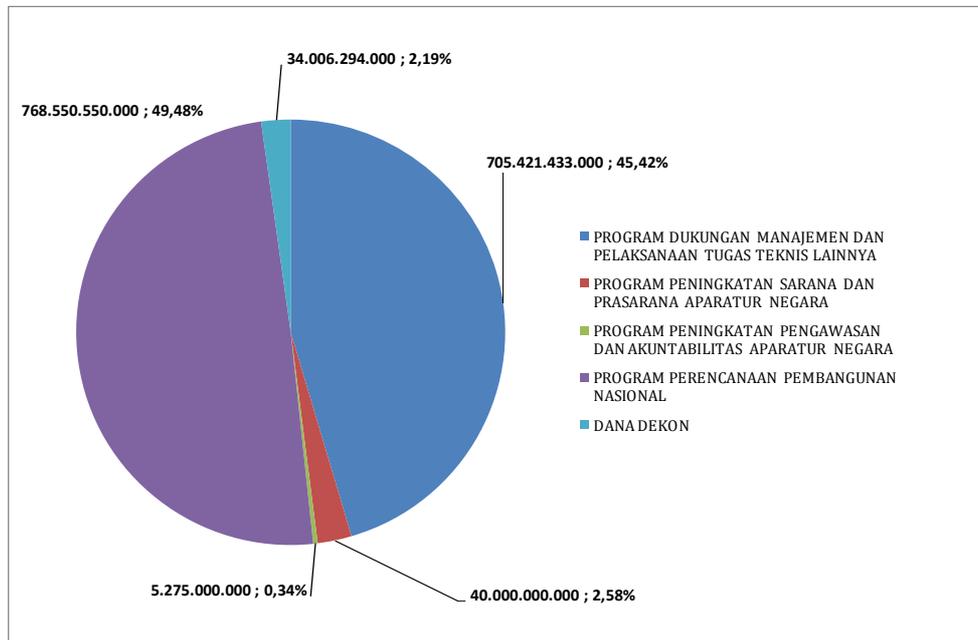
Anggaran Kementerian PPN/Bappenas dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan utama yang mendukung tercapainya penetapan kinerja tahun 2015, yang terdiri dari 2 Satker di Kementerian PPN/Bappenas yang dikelola oleh 18 (delapan belas) PPK yang tersebar di masing-masing program, dan 33 Satker di 33 provinsi. Rincian alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2015 menurut program terdapat pada Tabel 1, dan porsi anggaran masing-masing program dapat dilihat pada Gambar 2.

**TABEL 1**  
**ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

PROGRAM	PAGU ANGGARAN				
	RM	PHLN			TOTAL
		PLN	HLN	JUMLAH	
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	369.165.343.000	336.256.090.000	-	336.256.090.000	705.421.433.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	40.000.000.000			-	40.000.000.000
Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur	5.275.000.000	-		-	5.275.000.000
Perencanaan Pembangunan Nasional	244.717.720.000	68.104.011.000	455.728.819.000	523.832.830.000	768.550.550.000
<b>JUMLAH</b>	<b>659.158.063.000</b>	<b>404.360.101.000</b>	<b>455.728.819.000</b>	<b>860.088.920.000</b>	<b>1.519.246.983.000</b>

Sumber : Pagu DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015

**GAMBAR 2**  
**PROPORSI ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**



Berdasarkan Gambar 2 tersebut terlihat bahwa Program Perencanaan Pembangunan Nasional (termasuk dana yang dikelola oleh Pengelola Hibah MCC dan satker pengelola dana dekonsentrasi di seluruh provinsi) merupakan program yang mempunyai alokasi dana terbesar diantara program-program yang lain, kemudian disusul Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya yang mengelola gaji, tunjangan serta kegiatan strategis yang melibatkan hampir semua UKE I dan dan UKE II.

**TABEL 2**  
**ALOKASI ANGGARAN PHLN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN PHLN		
		PLN	HLN	JUMLAH
	<b>DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>	<b>336.256.090.000</b>	<b>-</b>	<b>336.256.090.000</b>
1	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS IV</b>	<b>336.256.090.000</b>	<b>-</b>	<b>336.256.090.000</b>
	a Pusbindiklatren	336.256.090.000	-	336.256.090.000
	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>68.104.011.000</b>	<b>455.728.819.000</b>	<b>523.832.830.000</b>
1	<b>PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN</b>	-	<b>17.872.821.000</b>	<b>17.872.821.000</b>
	b Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	-	15.411.766.000	15.411.766.000
	d Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	2.461.055.000	2.461.055.000
2	<b>PPK DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b>	-	<b>2.424.080.000</b>	<b>2.424.080.000</b>
	b Direktorat Politik dan Komunikasi	-	2.424.080.000	2.424.080.000
3	<b>PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	-	<b>1.339.105.000</b>	<b>1.339.105.000</b>
	f Direktorat Lingkungan Hidup	-	1.339.105.000	1.339.105.000
4	<b>PPK DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>11.285.000.000</b>	<b>15.990.091.000</b>	<b>27.275.091.000</b>
	b Direktorat Transportasi	11.285.000.000	14.100.000.000	25.385.000.000
	c Direktorat Permukiman dan Perumahan	-	1.890.091.000	1.890.091.000
5	<b>PPK DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH</b>	<b>4.070.000.000</b>	<b>1.016.537.000</b>	<b>5.086.537.000</b>
	b Direktorat Pengembangan Wilayah	4.070.000.000	-	4.070.000.000
	c Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	-	664.248.000	664.248.000
	d Direktorat Otonomi Daerah	-	352.289.000	352.289.000
6	<b>PPK DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN</b>	-	<b>6.086.185.000</b>	<b>6.086.185.000</b>
	d Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral	-	1.900.785.000	1.900.785.000
	e Direktorat Kerjasama Pembangunan Internasional	-	4.185.400.000	4.185.400.000
7	<b>PPK PROGRAM SUMBER DAYA AIR TERPADU</b>	<b>16.461.536.000</b>		<b>16.461.536.000</b>
8	<b>PPK SEKRETARIAT INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROGRAM</b>	<b>36.287.475.000</b>		<b>36.287.475.000</b>
9	<b>PPK SEKRETARIAT PERSIAPAN DAN PENGEMBANGAN MCC (SATKER 966009)</b>	-	<b>411.000.000.000</b>	<b>411.000.000.000</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>404.360.101.000</b>	<b>455.728.819.000</b>	<b>860.088.920.000</b>

Sumber : Pagu DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015

## **1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sasaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun anggaran 2015 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 768.550.550.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 244.717.720.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 523.832.830.000,- (Tabel 3).

Alokasi anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

- 1) Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/ penganggarannya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/ fungsi pemerintahan.
- 2) Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
- 3) Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.
- 4) Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.

Pengelolaan anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut terbagi menjadi 4 Satker yang terdiri dari:

- 1) Satker 017312 yang dikelola oleh 11 (sebelas) PPK yang berada di UKE I Kedeputian.
- 2) Satker 966010 yang dikelola oleh 1 (satu) PPK ICCTF.
- 3) Satker 966009 yang dikelola oleh 1 (satu) PPK Pengelola Hibah MCC.
- 4) Satker Dana Dekonsentrasi (34 Satker) di 34 provinsi (sebagaimana terdapat pada Tabel 5).

Alokasi dana dekonsentrasi tahun 2015 yang termasuk dalam Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebesar Rp. 34.006.294.000,- dengan sasaran penyelenggaraan dekonsentrasi penguatan sinergi pusat dan daerah di 34 provinsi (Tabel 3). Penyelenggaraan Dekonsentrasi bertujuan untuk (1) memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dan (2) memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka peningkatan kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional.

**TABEL 3**  
**ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**MENURUT PPK TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (dalam ribu)				TOTAL
		RM	PHLN		JUMLAH	
			PLN	HLN		
	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>246.216.917</b>	<b>68.104.011</b>	<b>455.728.819</b>	<b>523.832.830</b>	<b>770.049.747</b>
1	PPK Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	21.677.760	-	17.872.821.000	17.872.821.000	39.550.581.000
2	PPK Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	16.740.000	-	2.424.080.000	2.424.080.000	19.164.080.000
3	PPK Deputy Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan,	22.900.000	-	-	-	22.900.000.000
4	PPK Deputy Bidang Ekonomi	15.540.000	-	-	-	15.540.000.000
5	PPK Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	22.286.878	-	1.339.105.000	1.339.105.000	23.567.263.000
6	PPK Deputy Bidang Sarana dan Prasarana	24.066.860	11.285.000.000	15.990.091.000	27.275.091.000	51.341.951.000
7	PPK Deputy Bidang Pengembangan Regional	35.080.000	4.070.000.000	1.016.537.000	5.086.537.000	40.166.537.000
8	PPK Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan	15.410.000	-	6.086.185.000	6.086.185.000	21.496.185.000
9	PPK Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	14.690.000	-	-	-	15.690.000.000
10	PPK Program Sumber Daya Air Terpadu	6.724.000	16.461.536.000		16.461.536.000	23.185.536.000
11	PPK Sekretariat <i>Infrastructure Reform Sector Development Program</i>	23.214.980	36.287.475.000		36.287.475.000	59.502.455.000
12	PPK ICCTF	13.245.962	-		-	13.245.962.000
13	PPK Sekretariat Persiapan Dan Pengembangan MCC (Satker 966009)	13.000.000	-	411.000.000.000	411.000.000.000	424.000.000.000

Sumber : Pagu DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015

**TABEL 4**  
**ALOKASI DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
**TAHUN 2015**

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	ALOKASI (Rp)
1	010025	DKI Jakarta	799.291.000
2	020060	Jawa Barat	838.291.000
3	030060	Jawa Tengah	915.691.000
4	040069	DI Yogyakarta	920.491.000
5	050060	Jawa Timur	943.291.000
6	060004	Aceh	1.045.291.000
7	070060	Sumatera Utara	1.006.891.000
8	080019	Sumatera Barat	958.891.000
9	090020	Riau	962.491.000
10	100086	Jambi	931.291.000
11	110060	Sumatera Selatan	920.491.000
12	120022	Lampung	882.091.000
13	130019	Kalimantan Barat	949.291.000
14	140018	Kalimantan Tengah	960.691.000
15	150060	Kalimantan Selatan	961.291.000
16	160019	Kalimantan Timur	1.006.291.000
17	170021	Sulawesi Utara	1.079.491.000
18	180060	Sulawesi Tengah	1.080.091.000
19	190060	Sulawesi Selatan	1.008.091.000
20	200019	Sulawesi Tenggara	1.027.891.000
21	210019	Maluku	1.190.491.000
22	220060	Bali	976.291.000
23	230020	Nusa Tenggara Barat	974.491.000
24	240026	Nusa Tenggara Timur	1.078.291.000
25	250060	Papua	1.252.891.000
26	260070	Bengkulu	940.291.000
27	280016	Maluku Utara	1.167.091.000
28	290009	Banten	823.291.000
29	300092	Bangka Belitung	913.291.000
30	310060	Gorontalo	1.063.891.000
31	320099	Kepulauan Riau	955.291.000
32	330096	Papua Barat	1.400.491.000
33	340030	Sulawesi Barat	1.066.291.000
34	359000	Kalimantan Utara	1.006.291.000
<b>JUMLAH</b>			<b>34.006.294.000</b>

Sumber : Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 2 tahun 2015

## **2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah untuk meningkatkan efektifitas penyusunan RPJMN 2015-2019 dan RKP, serta terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 705.421.433.000,-, yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 369.165.343.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 336.256.090.000,- yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.
- 2) Penyempurnaan ketatalaksanaan.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.
- 4) Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (*brand image building*).
- 5) Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 6) Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.
- 7) Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan daerah.

Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dikelola oleh 5 (lima) PPK di Setmen PPN/Settama Bappenas dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup masing-masing UKE II. Secara rinci alokasi anggaran tahun 2015 pada masing-masing PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dapat dilihat pada Tabel 5.

**TABEL 5**  
**ALOKASI ANGGARAN**  
**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA**  
**MENURUT PPK TAHUN ANGGARAN 2015**

PROGRAM	PAGU ANGGARAN				
	RM	PHLN			TOTAL
		PLN	HLN	JUMLAH	
<b>DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>	<b>367.666.146.000</b>	<b>336.256.090.000</b>	<b>-</b>	<b>336.256.090.000</b>	<b>703.922.236.000</b>
1 PPK DM I	51.242.070.000	-	-	-	51.242.070.000
2 PPK DM II	34.543.362.000	-	-	-	34.543.362.000
3 PPK DM III	225.683.721.000	-	-	-	225.683.721.000
4 PPK DM IV	54.756.993.000	336.256.090.000	-	336.256.090.000	391.013.083.000
5 PPK DOM	1.440.000.000	-	-	-	1.440.000.000

Sumber : Pagu DIPA Bappenas Tahun 2015

### 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas adalah meningkatnya akses sarana dan prasarana, penguasaan data/informasi dan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan nasional. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000.000,-. Anggaran program ini dikelola oleh PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bappenas yang dilaksanakan oleh Biro Umum. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran.
- 2) Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum Dan Operasional.
- 3) Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan.

#### **4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas**

Sasaran Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas adalah meningkatnya efektifitas sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan bebas Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN). Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2015 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.275.000.000,-.

Anggaran program ini dikelola oleh PPK Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara yang berada di bawah pembinaan Inspektur Utama dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada UKE I dan II di Inspektorat Utama.

#### **C. PERUBAHAN (REVISI) DIPA TAHUN 2015**

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2015, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan perubahan/revisi DIPA, diantaranya:

1. Revisi tanggal 24 Februari 2015 adalah perubahan akun belanja.
2. Revisi satker 966009 tanggal 3 Maret 2015 adalah penambahan pagu hibah pada PPK Sekretariat Persiapan dan Pengembangan MCC menjadi Rp. 210.000.000.000,-.
3. Revisi tanggal 20 April 2015 adalah :
  - 1) Penambahan Belanja Operasional (002) sebesar Rp. 1.322.100.000,- pada PPK Program Dukungan Manajemen III (Biro Umum) yang berasal dari ICCTF.
  - 2) Penambahan pagu Pinjaman Pusbindiklatren menjadi Rp. 186.739.102.000,- pada kegiatan SPIRIT/WB, Rp. 29.045.744.000,- pada kegiatan PHRDP-III, dan Rp. 90.132.113.000,- pada kegiatan PHRDP-IV.
  - 3) Penambahan pagu Hibah Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Hibah *Assistance For Rice Fortification Or The Poor* (Hibah JFPR) pada Direktorat Kesehatan dan gizi masyarakat menjadi Rp. 3.059.130.000,- pada.
  - 4) Penambahan pagu Pinjaman Direktorat PKPS (IRSDP) menjadi Rp. 52.886.270.000,-.
  - 5) Pencatatan Hibah kegiatan *Slum Alleviation Policy and Action Plan* (SAPOLA) pada Direktorat Permukiman dan Perumahan ke dalam DIPA sebesar Rp. 1.890.091.000,-

- 6) Revisi Nomor Register *Hibah Urban Mobility Denpasar* pada Direktorat Transportasi.
  - 7) Realokasi Satker ICCTF sebesar Rp. 13.977.900.000,-.
4. Revisi tanggal 25 Mei 2015 adalah :
- 1) Pencantuman pagu Hibah kegiatan *People Centered Development Programme (PCDP)* pada Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal sebesar Rp. 664.248.000,-.
  - 2) Pencantuman pagu Hibah kegiatan UNFPA Country Programme Eight 2011-2015 pada Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 1.294.053.000,-.
  - 3) Pencantuman pagu Hibah kegiatan *Roadmap : Support To The Acceleration Of MDGs Achievement In Indonesia* pada Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat sebesar Rp. 2.045.388.000,-.
  - 4) Pencantuman pagu Hibah kegiatan Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama RI-UNICEF 2011-2015 pada Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat sebesar Rp. 3.255.196.000,-.
5. Revisi tanggal 30 Juli 2015 adalah :
- 1) Realokasi anggaran antar satker pada Direktorat Lingkungan Hidup menjadi Rp. 731.938.000,-.
  - 2) Realokasi anggaran Satker Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF) sebesar Rp. 13.245.962.000,-.
6. Revisi tanggal 11 Agustus 2015 adalah :
- 1) Realokasi anggaran antar kegiatan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana menjadi Rp. 52.250.161.000,-.
  - 2) Realokasi anggaran antar kegiatan pada Biro SDM menjadi Rp. 1.781.070.000,-.
7. Revisi tanggal 18 Desember 2015 adalah realokasi antar kegiatan pada :
- 1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana menjadi Rp. 49.850.161.000,-.
  - 2) Biro SDM menjadi Rp. 6.293.062.000,-.
  - 3) Pusdatinrenbang menjadi Rp. 9.360.300.000,-.
  - 4) Direktorat Evaluasi Kinerja Daerah menjadi Rp. 10.300.000.000,-.
  - 5) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang menjadi Rp. 32.397.397.000,-.

8. Revisi tanggal 28 Oktober 2015 adalah :

- 1) Penambahan Pagu Pinjaman pada Pusbindiklatren menjadi Rp. 336.256.090.000,-
- 2) Penambahan Pagu Hibah pada Direktorat Kesehatan dan Gizi masyarakat menjadi Rp. 15.411.766.000,-
- 3) Penambahan Pagu Hibah pada Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Rp. 2.461.055.000,-
- 4) Pencantuman Hibah Langsung pada Direktorat Otonomi Daerah sebesar Rp. 352.289.000,-
- 5) Pencantuman Hibah Langsung pada Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- 6) Penambahan Pagu Pinjaman pada Direktorat Pengairan dan Irigasi menjadi Rp. 16.461.536.000,-
- 7) Pengurangan Pagu Pinjaman IRSDP pada Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta menjadi Rp. 36.287.475.000,-
- 8) Pencantuman Hibah Langsung *Indonesian Democracy Index* (IDI) pada Direktorat Politik dan Komunikasi sebesar Rp. 1.809.600.000,-
- 9) Realokasi Satker (Dana Dekonsentrasi) Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 1.006.291.000,-

9. Revisi tanggal 1 Desember 2015 adalah :

- 1) Pencantuman Hibah Langsung pada Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral sebesar Rp. 400.785.000,-
- 2) Pencantuman Hibah Langsung *Indonesian Democracy Index* (IDI) pada Direktorat Politik dan Komunikasi sebesar Rp. 614.480.000,-
- 3) Pencantuman Hibah Langsung pada Direktorat Kerjasama Pembangunan Internasional sebesar Rp. 4.185.400.000,-

### BAB III

## REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2015

Sebagaimana dijelaskan di atas alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015 secara keseluruhan sebesar Rp. 1.519.246.983.000,- yang terdiri dana RM sebesar Rp. 659.158.063.000,-, dana PLN sebesar Rp. 404.360.101.000,- dan HLN sebesar Rp. 455.728.819.000,-. Realisasi penyerapan anggaran (diluar pelaksanaan dana dekonsentrasi) sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp. 1.320.680.155.872,- (96,93%), yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 541.694.140.736,- (82,18%), dana PHLN sebesar Rp. 778.986.015.136,- (90,57%). Rincian realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir Desember tahun 2015 dari masing-masing program sebagaimana terdapat pada Tabel 6 dan dijelaskan sebagai berikut.

**TABEL 6**  
**REALISASI ANGGARAN SATKER KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
**TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015**

PROGRAM	REALISASI ANGGARAN					
	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	285.582.491.658	77,67	301.179.998.161	89,57	586.762.489.819	83,36
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	35.738.855.782	89,35	-	-	35.738.855.782	89,35
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	4.436.970.429	84,11	-	-	4.436.970.429	84,11
Perencanaan Pembangunan Nasional	215.935.822.867	87,70	477.806.016.975	91,21	693.741.839.842	90,09
<b>JUMLAH</b>	<b>541.694.140.736</b>	<b>82,18</b>	<b>778.986.015.136</b>	<b>90,57</b>	<b>1.320.680.155.872</b>	<b>86,93</b>

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

### **A. Program Perencanaan Pembangunan Nasional**

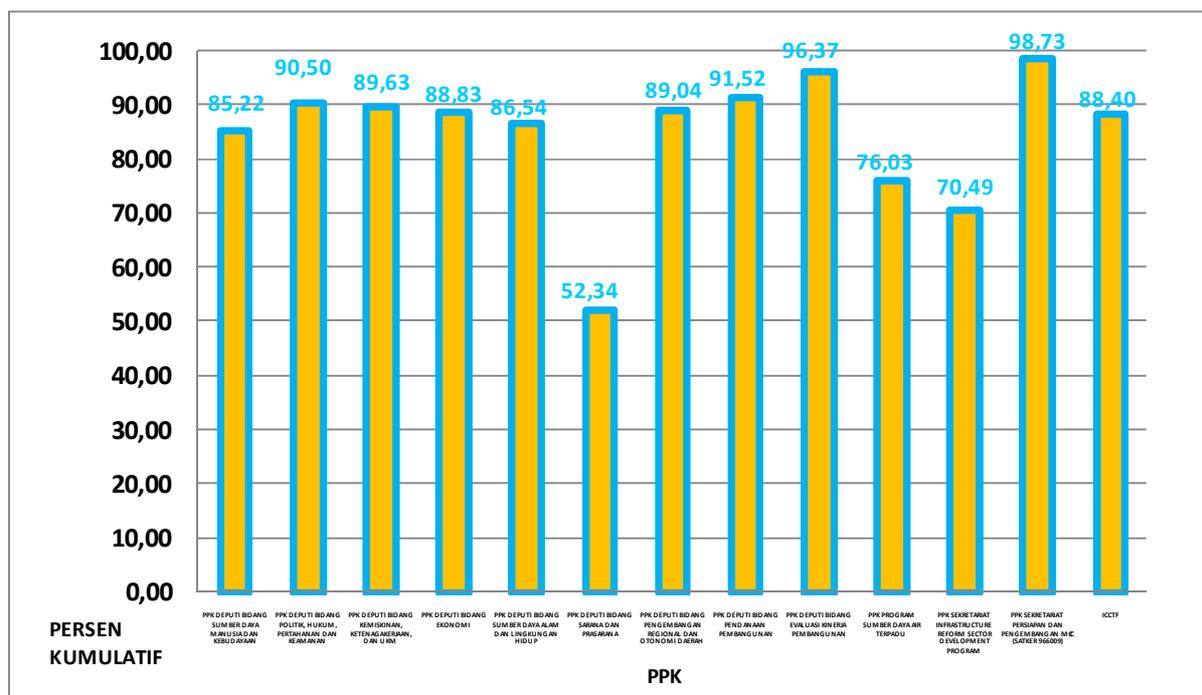
Alokasi anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015 sebesar Rp. 770.049.747.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 246.216.917.000,-, dan dana PHLN sebesar Rp. 523.832.830.000,-. Sampai dengan akhir Desember 2015, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 693.741.839.842,- (90,09%). Anggaran program ini dikelola oleh 13 (tiga belas) PPK yang berada di UKE I dengan rincian realisasi penyerapan dan komposisinya sebagaimana terdapat pada Tabel 7 dan Gambar 3.

**TABEL 7**  
**REALISASI ANGGARAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**(NON DANA DEKONSENTRASI)**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2015**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL</b>		<b>246.216.917.000</b>	<b>523.832.830.000</b>	<b>770.049.747.000</b>	<b>215.935.822.867</b>	<b>87,70</b>	<b>477.806.016.975</b>	<b>91,21</b>	<b>693.741.839.842</b>	<b>90,09</b>
1	PPK DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT, DAN KEBUDAYAAN	21.677.760.000	17.872.821.000	39.550.581.000	18.316.165.600	84,49	15.390.291.717	86,11	33.706.457.317	85,22
2	PPK DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	17.439.197.000	2.424.080.000	19.863.277.000	15.664.672.298	89,82	2.312.064.033	-	17.976.736.331	90,50
3	PPK DEPUTI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	22.900.000.000	-	22.900.000.000	20.525.198.383	89,63	-	-	20.525.198.383	89,63
4	PPK DEPUTI BIDANG EKONOMI	15.540.000.000	-	15.540.000.000	13.804.830.260	88,83	-	-	13.804.830.260	88,83
5	PPK DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM	22.228.158.000	1.339.105.000	23.567.263.000	19.054.958.582	85,72	1.339.104.039	100,00	20.394.062.621	86,54
6	PPK DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA	24.066.860.000	27.275.091.000	51.341.951.000	21.563.618.816	89,60	5.309.578.430	19,47	26.873.197.246	52,34
7	PPK DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL	35.080.000.000	5.086.537.000	40.166.537.000	31.238.644.303	89,05	4.525.235.168	88,96	35.763.879.471	89,04
8	PPK DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN	15.410.000.000	6.086.185.000	21.496.185.000	14.299.821.190	92,80	5.374.124.450	88,30	19.673.945.640	91,52
9	PPK DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	15.690.000.000	-	15.690.000.000	15.120.330.113	96,37	-	-	15.120.330.113	96,37
10	PPK PROGRAM SUMBER DAYA AIR TERPADU	6.724.000.000	16.461.536.000	23.185.536.000	5.516.734.533	82,05	12.110.300.425	73,57	17.627.034.958	76,03
11	PPK SEKRETARIAT IRS DP	23.214.980.000	36.287.475.000	59.502.455.000	16.877.401.530	72,70	25.066.896.746	69,08	41.944.298.276	70,49
12	PPK ICCTF (SATKER 966010)	13.245.962.000	-	13.245.962.000	11.709.725.347	88,40	-	-	11.709.725.347	88,40
13	PPK SEKRETARIAT MCC	13.000.000.000	411.000.000.000	424.000.000.000	12.243.721.912	94,18	406.378.421.967	98,88	418.622.143.879	98,73

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

**GAMBAR 3**  
**GRAFIK REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**MENURUT PPK TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015**



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

Realisasi penyerapan tertinggi sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 terdapat pada PPK Sekretariat MCC yaitu 98,73%, kemudian PPK Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan sebesar 96,37%. Sedangkan penyerapan terendah terdapat pada PPK Dputi Bidang Sarana dan Prasarana yaitu 52,34%. Berikut penjelasan realisasi penyerapan oleh setiap PPK.

### 1) PPK Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan

Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2015 sebesar Rp. 39.550.581.000,- terdiri dari dana RM sebesar Rp. 21.677.760.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 17.872.821.000,-. Sampai dengan akhir bulan Desember, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 33.706.457.317,- (85,22%) sebagaimana terdapat dalam Tabel 8.

**TABEL 8**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT, DAN**  
**KEBUDAYAAN**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2015**



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

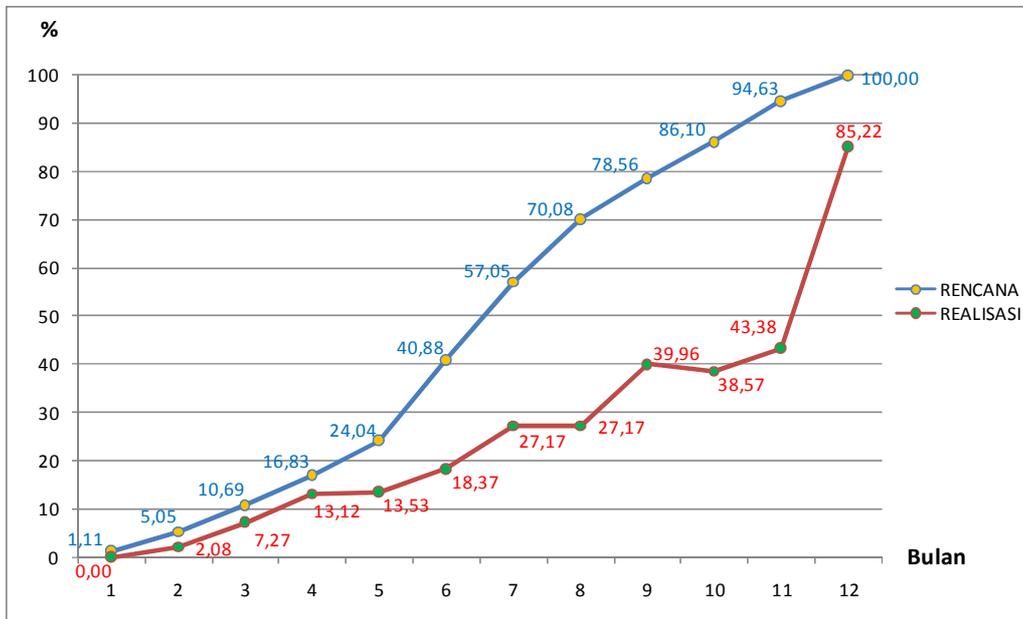
Dana HLN pada Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Dikelola oleh Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat dan Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Hibah tersebut antara lain:

- a. *Country Programme Action Plan (CPAP) 2011-2015 Government of Indonesia - UNICEF Programme of Cooperation.* Tujuan dari hibah ini adalah untuk mendukung Pemerintah dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Ibu dan Anak.
- b. *Support to the Acceleration of MDG Achievement in Indonesia (2013-2015).* Hibah dari UNDP ini bertujuan untuk percepatan tujuan MDGs telah dimulai pada 31 Januari 2013 dan akan berakhir pada 31 Desember 2015. Hibah ini dilaksanakan oleh Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat,

Realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing unit kerja dapat terlihat pada Gambar 4.

**GAMBAR 4**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT, DAN**  
**KEBUDAYAAN**  
**SAMPAI TRIWULAN IV TAHUN 2015**



**2) PPK Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan**

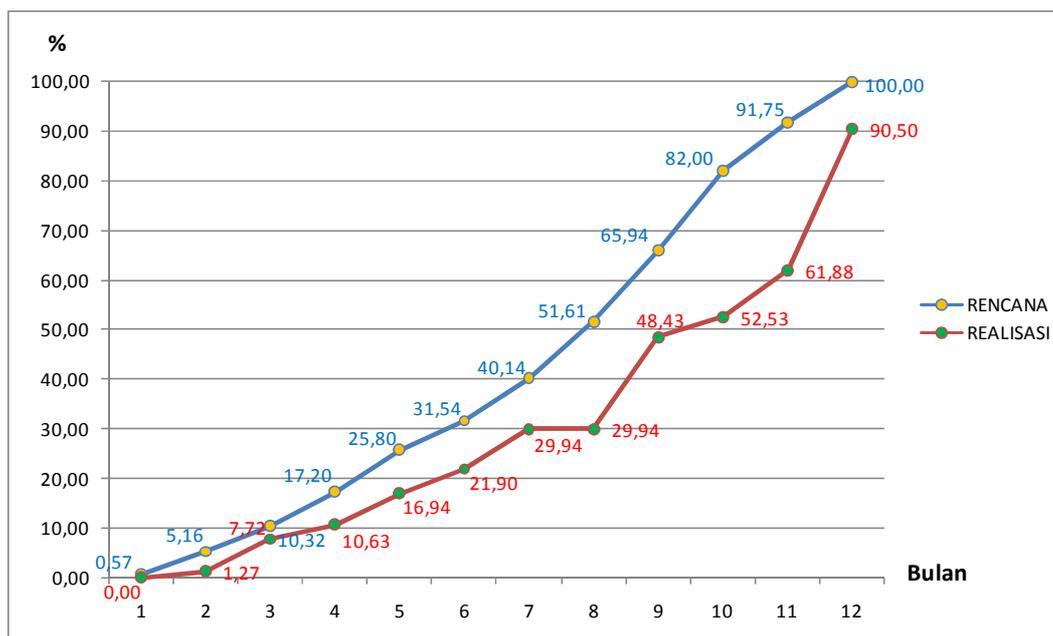
Alokasi anggaran PPK Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) sebesar Rp. 19.863.277.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp. 17.976.736.331,- (90,50%). Kegiatan yang dilaksanakan oleh UKE II di Kedeputian Bidang Polhukhankam dalam rangka mendukung penyusunan rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan rencana pendanaan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 9 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 5.

**TABEL 9**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG POLHUKHANKAM**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2015**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
2	PPK DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	17.439.197.000	2.424.080.000	19.863.277.000	15.664.672.298	89,82	2.312.064.033	-	17.976.736.331	90,50
	a Sekretariat PPK Deputy Bidang Polhankam	850.000.000	-	850.000.000	777.757.362	91,50	-	-	777.757.362	91,50
	b Direktorat Politik dan Komunikasi	4.170.000.000	2.424.080.000	6.594.080.000	3.684.338.341	88,35	2.312.064.033	-	5.996.402.374	90,94
	c Direktorat Aparatur Negara	4.149.197.000	-	4.149.197.000	3.454.489.827	83,26	-	-	3.454.489.827	83,26
	d Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia	3.700.000.000	-	3.700.000.000	3.477.386.795	93,98	-	-	3.477.386.795	93,98
	e Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan	2.620.000.000	-	2.620.000.000	2.536.687.352	96,82	-	-	2.536.687.352	96,82
	f Direktorat Pertahanan dan Keamanan	1.950.000.000	-	1.950.000.000	1.734.012.621	88,92	-	-	1.734.012.621	88,92

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

**GAMBAR 5**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG POLHUKHANKAM**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2015**



### 3) PPK Deputy Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Alokasi anggaran PPK Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp. 22.900.000.000,-, dengan realisasi penyerapan sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp. 20.525.198.383,- (89,63%). Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 10 dan

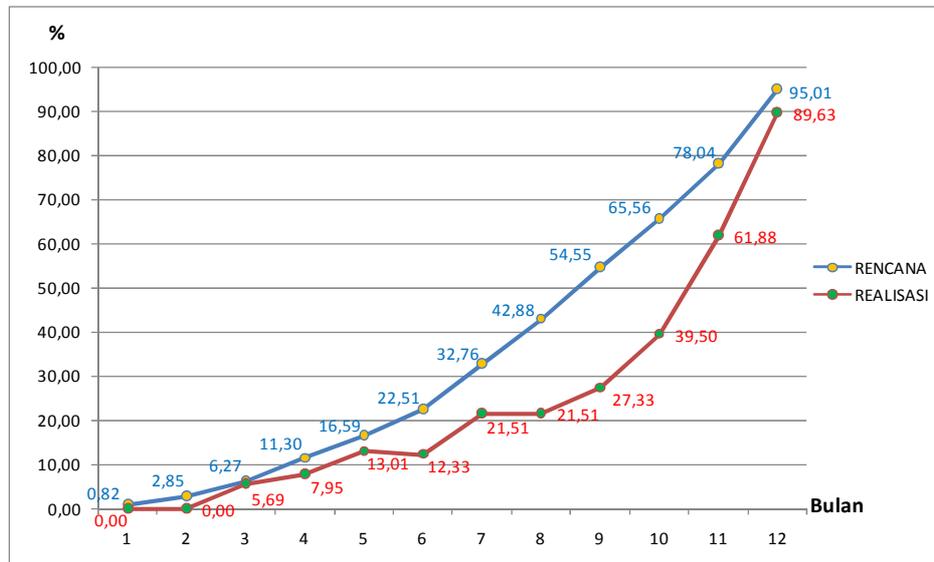
perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 6.

**TABEL 10**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN**  
**TIRWULAN IV TAHUN 2015**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
3	PPK DEPUTI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	22.900.000.000	-	22.900.000.000	20.525.198.383	89,63	-	-	20.525.198.383	89,63
a	Sekretariat PPK Dep. Bid. Kemiskinan, Ketenagakerjaan & UKM	900.000.000	-	900.000.000	801.292.596	89,03	-	-	801.292.596	89,03
b	Direktorat Penanggulangan Kemiskinan	5.250.000.000	-	5.250.000.000	5.048.604.704	96,16	-	-	5.048.604.704	96,16
c	Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja	4.350.000.000	-	4.350.000.000	4.236.779.849	97,40	-	-	4.236.779.849	97,40
d	Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.750.000.000	-	3.750.000.000	3.002.592.018	80,07	-	-	3.002.592.018	80,07
e	Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat	2.500.000.000	-	2.500.000.000	2.431.182.675	97,25	-	-	2.431.182.675	97,25
f	Global Pulse	6.150.000.000	-	6.150.000.000	5.004.746.541	81,38	-	-	5.004.746.541	81,38

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

**GAMBAR 6**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2015**



#### 4) PPK Deputi Bidang Ekonomi

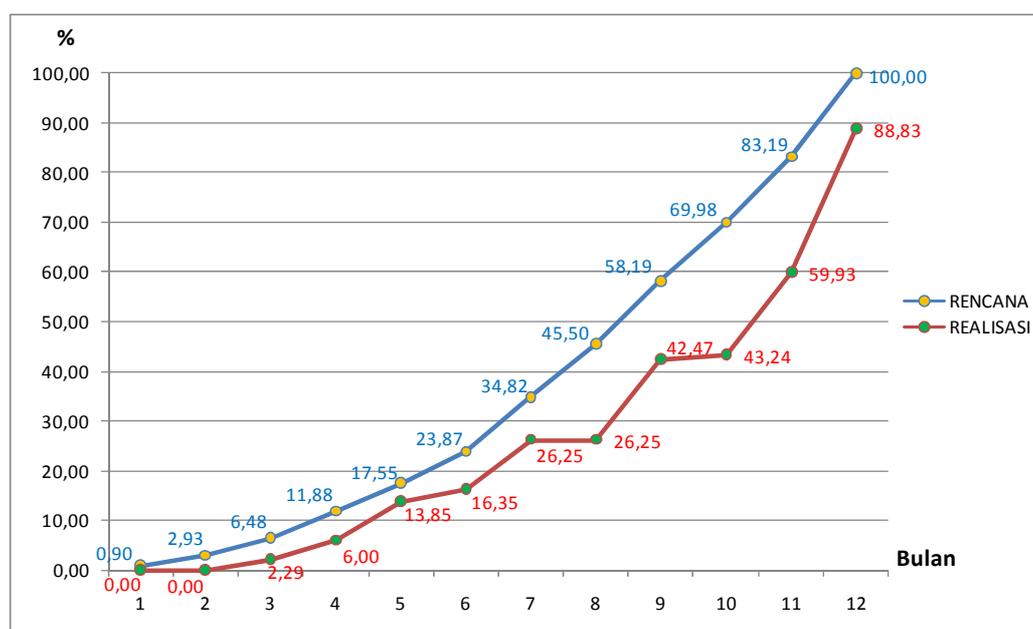
Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Ekonomi sebesar Rp. 15.540.000.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp. 13.804.830.260,- (88,83%). Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada UKE II termasuk untuk kegiatan koordinasi kedeputian sebagaimana terdapat pada Tabel 11 dan dengan perkembangan realisasi penyerapan anggaran setiap bulan terlihat pada Gambar 7.

**TABEL 11**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG EKONOMI**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2015**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
4	PPK DEPUTI BIDANG EKONOMI	15.540.000.000	-	15.540.000.000	13.804.830.260	88,83			13.804.830.260	88,83
	a Sekretariat PPK Deputi Bidang Ekonomi	350.000.000	-	350.000.000	302.167.275	86,33	-		302.167.275	86,33
	b Direktorat Perencanaan Makro	3.350.000.000	-	3.350.000.000	2.723.018.421	81,28	-		2.723.018.421	81,28
	c Direktorat Keuangan Negara	3.274.000.000	-	3.274.000.000	2.846.731.477	86,95	-		2.846.731.477	86,95
	d Direktorat Jasa Keuangan dan Analisa Moneter	2.258.000.000	-	2.258.000.000	2.104.623.278	93,21	-		2.104.623.278	93,21
	e Dir. Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional	2.750.000.000	-	2.750.000.000	2.632.066.226	95,71	-		2.632.066.226	95,71
	f Direktorat Industri, IPTEK, dan BUMN	3.558.000.000	-	3.558.000.000	3.196.223.583	89,83	-		3.196.223.583	89,83

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

**GAMBAR 7**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI EKONOMI**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2015**



## 5) PPK Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

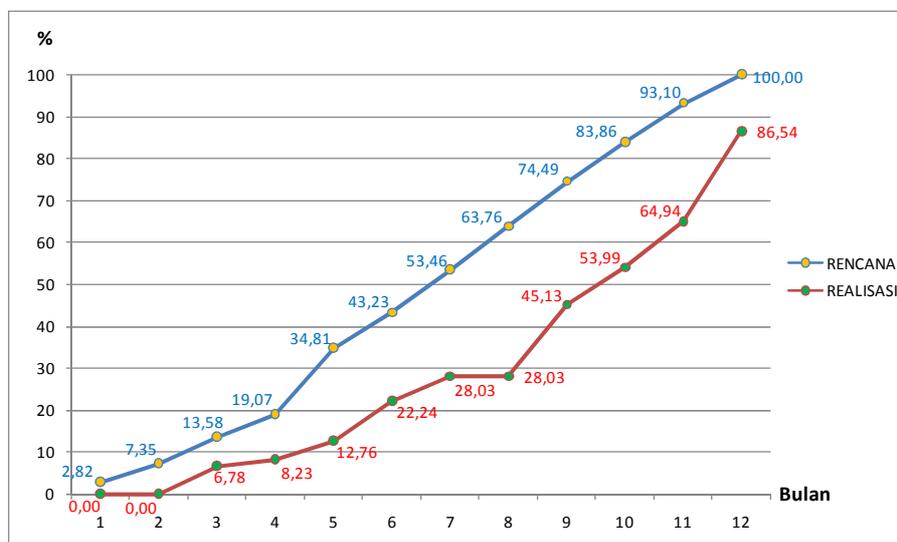
Alokasi anggaran PPK Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada tahun 2015 sebesar Rp. 23.567.263.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir Desember 2015 sebesar Rp. 20.394.062.621,- (86,54%). Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada UKE II termasuk untuk kegiatan koordinasi kedeputian. Sedangkan untuk hibah, dibiayai oleh USAID pada kegiatan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung program-program ICCTF dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam mengatasi dampak perubahan iklim terkait pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan ketahanan nasional kepada entitas non-pemerintah. Perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing UKE II dapat dilihat pada Gambar 8.

**TABEL 12**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2015**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
5	PPK DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM	22.228.158.000	1.339.105.000	23.567.263.000	19.054.958.582	85,72	1.339.104.039	100,00	20.394.062.621	86,54
	a Sekretariat PPK Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2.802.840.000	-	2.802.840.000	2.423.565.314	86,47	-	-	2.423.565.314	86,47
	b Direktorat Pangan dan Pertanian	3.720.000.000	-	3.720.000.000	3.448.383.667	92,70	-	-	3.448.383.667	92,70
	c Direktorat Kehutanan & Konservasi Sumber Daya Air	3.140.000.000	-	3.140.000.000	2.722.422.454	86,70	-	-	2.722.422.454	86,70
	d Direktorat Kelautan dan Perikanan	3.500.000.000	-	3.500.000.000	2.882.743.760	82,36	-	-	2.882.743.760	82,36
	e Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	3.120.000.000	-	3.120.000.000	2.904.086.906	93,08	-	-	2.904.086.906	93,08
	f Direktorat Lingkungan Hidup	4.681.938.000	1.339.105.000	6.021.043.000	3.482.348.018	74,38	1.339.104.039	100,00	4.821.452.057	80,08
	g ICCTF	1.263.380.000	-	1.263.380.000	1.191.408.463	94,30	-	-	1.191.408.463	94,30

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

**GAMBAR 8**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2015**



#### 6) PPK Deputy Bidang Sarana dan Prasarana

Alokasi anggaran PPK Deputy Bidang Sarana dan Prasarana pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 51.341.951.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 26.873.197.246 (52,34%), sedangkan realisasi penyerapan dana PHLN sebesar 19,47 %.

Kegiatan yang didanai oleh PHLN yang belum terserap tersebut adalah:

1. Kegiatan Pinjaman yang dikelola oleh Direktorat Transportasi Tahun Anggaran 2015 yaitu ***Regional Road Development Project (RRDP) - Study on Indonesia Transport Sector Deelopment Strategy and Policy*** (Loan 2817-INO). Pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) ini untuk meningkatkan kinerja sektor transportasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia direncanakan akan selesai pada 31 Mei 2017. Nilai kontrak seluruhnya untuk proyek ini sebesar \$ 1.300.000, dengan alokasi di TA 2015 sebesar Rp.11.285.000.000.
2. Hibah langsung yang dikelola oleh Direktorat Transportasi Tahun Anggaran 2015 adalah ***Consulting Services for the Preparation of a Pre-Feasibility in Urban Mobility Denpasar Project*** - BMZ ID 2099 15 356 (KfW) dan ***Technical Assistance for The Surabaya Urban Transport Corridor Development Project*** - TF 016825 (World Bank).

a. **Consulting Services for the Preparation of a Pre-Feasibility in Urban Mobility Denpasar Project** - BMZ ID 2099 15 356 – KfW

Hibah dari KfW ini memiliki tujuan untuk membantu Pemerintah Kota Denpasar dalam menyusun strategi 5 tahunan transportasi umum yang atraktif, aman dan terjangkau secara ekonomi di Kota Denpasar. Nilai kontrak kegiatan ini sebesar EUR 229.450 atau alokasi di TA 2015 sebesar Rp. 3.600.000.000. Periode pelaksanaan kegiatan ini selama 5 (lima) bulan dan pelaksanaannya telah selesai. Saat ini ADPL WA sudah selesai dan tengah menunggu diterbitkan SP-3.

b. **Technical Assistance for The Surabaya Urban Transport Corridor Development Project** - TF 016825 – World Bank.

Penyusunan studi kelayakan untuk mendukung rencana investasi Pemerintah Kota Surabaya dalam pembangunan Kereta Api Cepat Perkotaan dengan nilai kontrak sebesar USD 1.250.000 atau alokasi pada TA 2015 sebesar Rp.10.500.000.000. Progres kegiatan ini yaitu akan dilakukan persiapan pembahasan *Data Collection, Market Assessment, dan Preliminary Design*. Lalu setelahnya akan dilakukan penarikan di kuartal IV (bulan November) ini yaitu sebesar USD 625.000 atau sebesar 50% dari nilai kontrak.

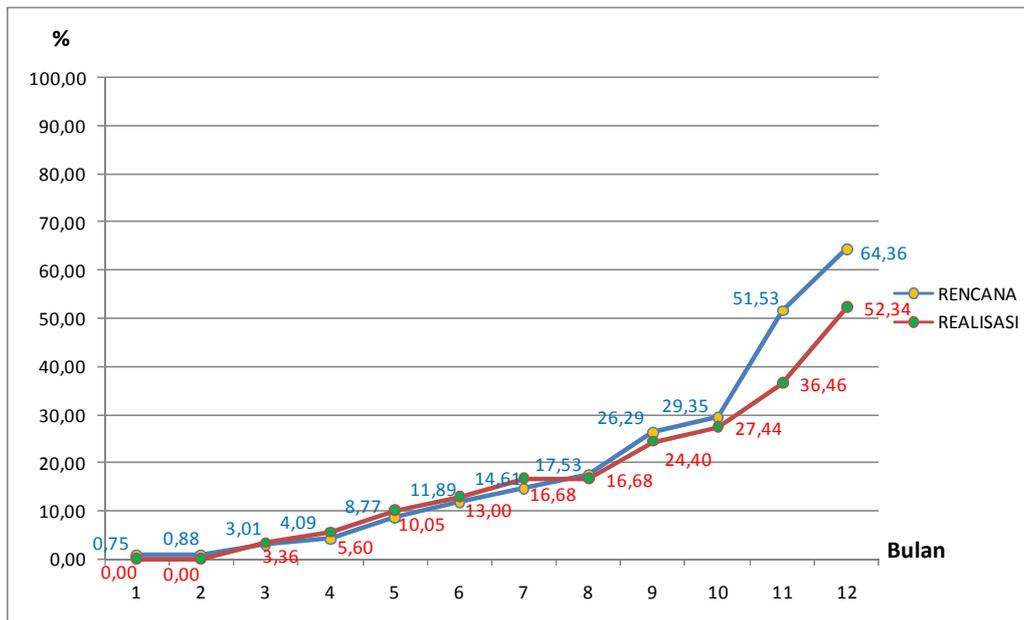
Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 13 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 9.

**TABEL 13**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA TRIWULAN IV TAHUN 2015**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
6	PPK DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA	24.066.860.000	27.275.091.000	51.341.951.000	21.563.618.816	89,60	5.309.578.430	19,47	26.873.197.246	52,34
	a Sekretariat PPK Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	350.000.000	-	350.000.000	312.879.444	89,39			312.879.444	89,39
	b Direktorat Transportasi	8.026.000.000	25.385.000.000	33.411.000.000	7.923.520.590	98,72	3.419.488.071	13,47	11.343.008.661	33,95
	c Direktorat Permukiman dan Perumahan	4.540.860.000	1.890.091.000	6.430.951.000	4.035.983.162	88,88	1.890.090.359	100,00	5.926.073.521	92,15
	d Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informatika	5.150.000.000	-	5.150.000.000	4.468.347.771	86,76	-		4.468.347.771	86,76
	e Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta	6.000.000.000	-	6.000.000.000	4.822.887.849	80,38	-		4.822.887.849	80,38

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

**GAMBAR 9**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI SARANA DAN PRASARANA TRIWULAN IV TAHUN 2015**



**7) PPK Deputy Bidang Pengembangan Regional**

Alokasi anggaran PPK Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah tahun 2015 sebesar Rp. 40.166.537.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 35.080.000.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 5.086.537.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir Desember 2015 mencapai Rp. 35.763.879.471,- (89,04%) sebagaimana terdapat pada Tabel 14.

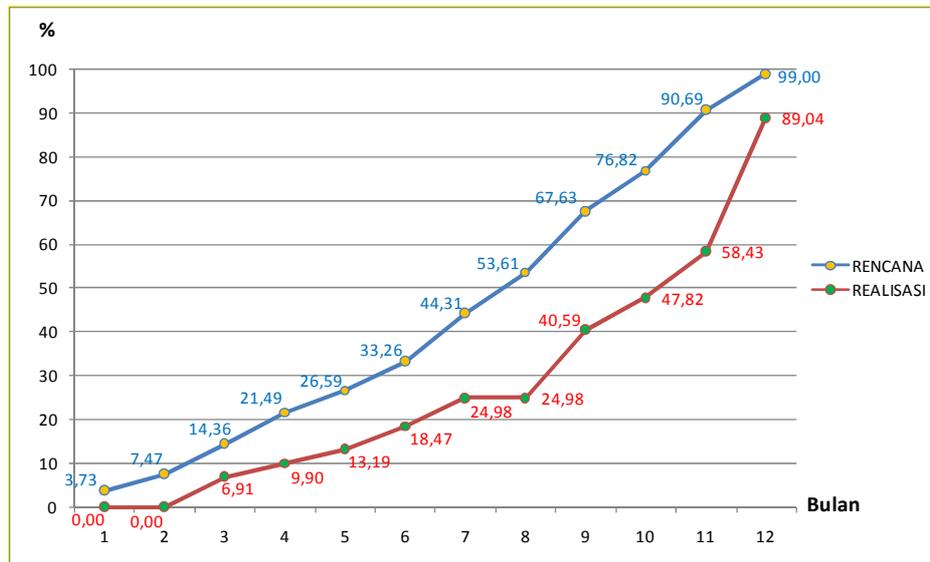
**TABEL 14**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2015**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
7	<b>PPK DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL</b>	<b>35.080.000.000</b>	<b>5.086.537.000</b>	<b>40.166.537.000</b>	<b>31.238.644.303</b>	<b>89,05</b>	<b>4.525.235.168</b>	<b>88,96</b>	<b>35.763.879.471</b>	<b>89,04</b>
	a Sekretariat PPK Deputy Bid. Pengembangan Regional & Otda	350.000.000	-	350.000.000	349.964.900	99,99	-	-	349.964.900	99,99
	b Direktorat Pengembangan Wilayah	9.084.719.000	4.070.000.000	13.154.719.000	8.161.088.360	89,83	3.704.490.146	91,02	11.865.578.506	90,20
	c Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	4.230.000.000	664.248.000	4.894.248.000	3.890.786.065	91,98	663.742.862	99,92	4.554.528.927	93,06
	d Direktorat Otonomi Daerah	4.955.281.000	352.289.000	5.307.570.000	4.693.608.212	94,72	157.002.160	44,57	4.850.610.372	91,39
	e Direktorat Perkotaan dan Perdesaan	11.950.000.000	-	11.950.000.000	9.657.773.073	80,82	-	-	9.657.773.073	80,82
	f Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan	4.510.000.000	-	4.510.000.000	4.485.423.693	99,46	-	-	4.485.423.693	99,46

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

Perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing unit kerja Kedeputan Bidang Pengembangan Regional terlihat pada Gambar 10.

**GAMBAR 10**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI PENGEMBANGAN REGIONAL**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2015**



Pelaksanaan pinjaman *Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RISE) II* yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Wilayah bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan dengan berbasis pada sumberdaya lokal untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki pengelolaan pemerintah daerah di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, serta penguatan institusi lokal di tingkat Desa. Untuk dan Hibah yang dikelola Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, pencantuman dalam DIPA Bappenas baru disahkan tanggal 25 Mei 2015 (Revisi-3).

#### 8) PPK Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan

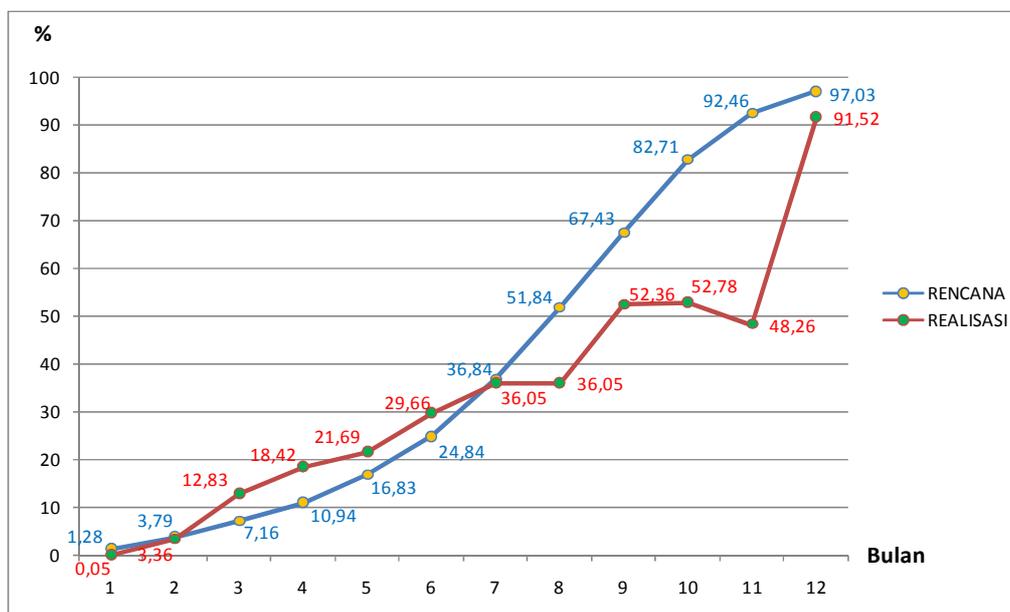
Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2015 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 21.496.185.000,-. Kegiatan yang dibiayai oleh hibah UNDP yaitu *Strengthening Innovative Partnership for Development Cooperation (SIPDC)* yang bertujuan mendukung Kementerian PPN/Bappenas dan kapasitas kementerian untuk membangun dan membina kemitraan global untuk kerjasama pembangunan. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 19.673.945.640,- (91,2%) sebagaimana terdapat pada Tabel 15.

**TABEL 15**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2015**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
8	PPK DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN	15.410.000.000	6.086.185.000	21.496.185.000	14.299.821.190	92,80	5.374.124.450	88,30	19.673.945.640	91,52
a	Sekr. PPK Deputi Bid. Pendanaan Pembangunan	1.050.000.000	-	1.050.000.000	1.047.054.672	99,72	-	-	1.047.054.672	99,72
b	Dir. Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	1.966.059.000	-	1.966.059.000	1.860.670.005	94,64	-	-	1.860.670.005	94,64
c	Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan	3.772.803.000	-	3.772.803.000	3.611.469.578	95,72	-	-	3.611.469.578	95,72
d	Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral	2.690.309.000	1.900.785.000	4.591.094.000	2.490.850.922	92,59	1.303.724.450	68,59	3.794.575.372	82,65
e	Direktorat Kerjasama Pembangunan Internasional	4.113.985.000	4.185.400.000	8.299.385.000	3.509.592.765	85,31	4.070.400.000	97,25	7.579.992.765	91,33
f	Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral	1.816.844.000	-	1.816.844.000	1.780.183.248	97,98	-	-	1.780.183.248	97,98

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

**GAMBAR 11**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI PENDANAAN PEMBANGUNAN**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2015**



**9) PPK Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan**

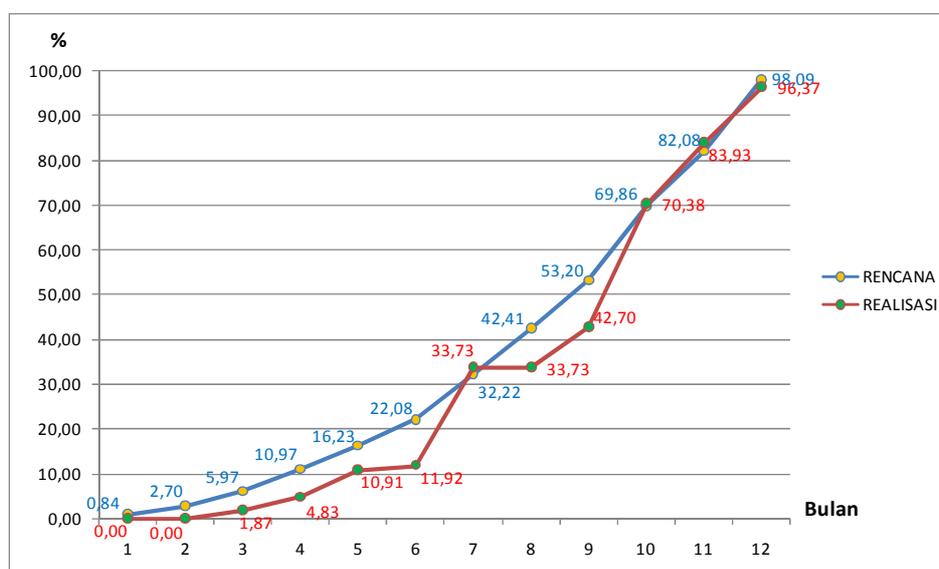
Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan sebesar Rp. 15.690.000.000,-, dengan realisasi penyerapan mencapai sebesar Rp. 15.120.330.113,- (96,37%). Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 16 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 12.

**TABEL 16**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN**  
**PEMBANGUNAN**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2015**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
9	PPK DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	15.690.000.000	-	15.690.000.000	15.120.330.113	96,37			15.120.330.113	96,37
a	Sekretariat PPK Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan	350.000.000	-	350.000.000	349.804.460	99,94	-		349.804.460	99,94
b	Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10.300.000.000	-	10.300.000.000	10.055.607.973	97,63	-		10.055.607.973	97,63
c	Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor	2.670.000.000	-	2.670.000.000	2.426.371.285	90,88	-		2.426.371.285	90,88
d	Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan	2.370.000.000	-	2.370.000.000	2.288.546.395	96,56	-		2.288.546.395	96,56

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

**GAMBAR 12**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN**  
**PEMBANGUNAN**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2015**

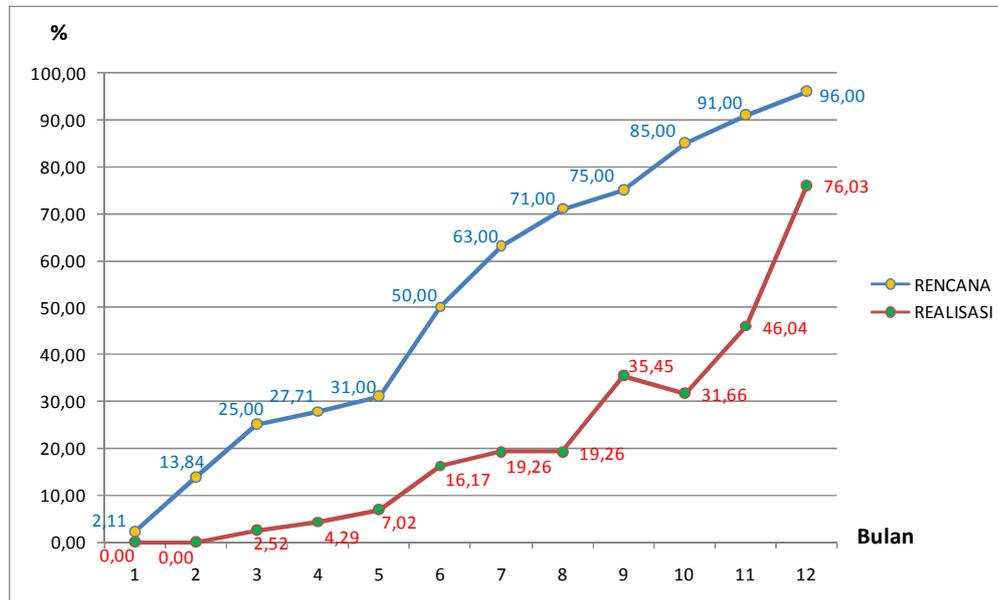


#### 10) PPK Program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Alokasi anggaran PPK Program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 23.185.536.000,- yang terdiri dari RM sebesar Rp. 6.724.000.000,- dan dana PLN sebesar Rp. 16.461.536.000,-. Realisasi penyerapan sampai dengan Desember 2015 sebesar 17.627.034.958,- (76,03%), sementara realisasi penyerapan dana PLN mencapai 73,57% atau sebesar Rp. 12.110.300.425,-. Untuk anggaran PHLN terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu :

1. *Consulting Service for Participatory Irrigation Rehabilitation and Improvement Management (PIRIMP)*, yang dibiayai oleh JICA (Jepang). Kegiatan tersebut bertujuan untuk peningkatan produksi padi melalui rehabilitasi dan pengembangan sistem jaringan irigasi dan peningkatan operasi dan pemeliharannya di lokasi bagian barat Indonesia untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan nasional.
2. *Decentralized Irrigation System Improvement Project in Eastern Region of Indonesia II (DISIMP II)*, yang dibiayai oleh JICA (Jepang). Kegiatan ini bertujuan untuk Mengurangi kemiskinan daerah tertinggal di bagian timur Indonesia melalui pembentukan pertanian beririgasi yang dapat memberi keuntungan, dan pertanian beririgasi yang berkelanjutan melalui irigasi yang didasarkan pada pengembangan.
3. *Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP)*. Kegiatan tersebut bersumber dari *World Bank* dan bertujuan untuk, (i) Meningkatkan keamanan dan fungsi bendungan besar milik Kementerian Pekerjaan Umum terutama dalam penyediaan air baku; (ii) Memperkuat kemampuan Pemerintah dalam pengembangan kebijakan, pengaturan dan administrasi pengelolaan operasi dan keamanan bendungan.
4. *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program Project 1 (ICWRMIP)*, bertujuan untuk pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu di Wilayah Sungai Citarum.
5. *Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities (UFC)*, memiliki tujuan untuk mengurangi kerusakan banjir di kota-kota terpilih dengan memperbaiki infrastruktur pengendali banjir, meningkatkan kapasitas pengelolaan DAS dan pengembangan rencana manajemen banjir dengan tujuan untuk mendukung agenda nasional adaptasi perubahan iklim, dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan industri di kota kota di Indonesia.
6. *Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP II)* untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dan irigasi serta meningkatkan produktivitas pertanian di lahan beririgasi.

**GAMBAR 13**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU TRIWULAN IV**  
**TAHUN 2015**



**11) PPK Sekretariat *Infrastructure Reform Sector Development Program***

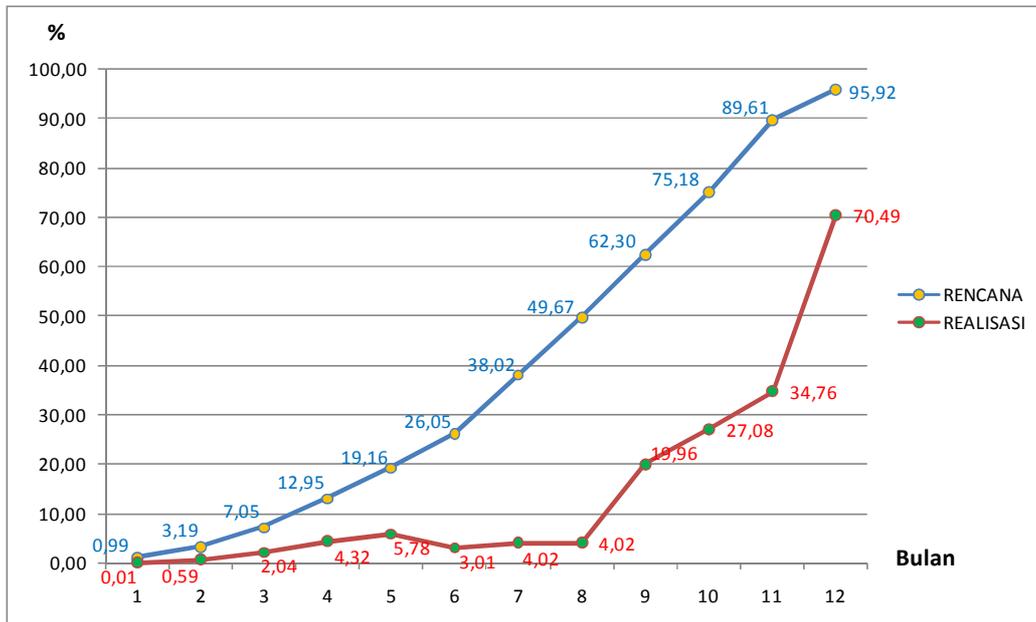
Alokasi anggaran pada PPK Sekretariat *Infrastructure Reform Sector Development Program* sebesar Rp. 59.502.455.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 23.214.980.000,- dan dana PLN sebesar Rp. 36.287.475.000,-

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp. 41.944.298.276,- (70,49%).

Kegiatan P2MPD bertujuan memberikan bantuan teknis untuk memfasilitasi penyiapan proyek infrastruktur dengan mengikutsertakan sektor swasta, yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dengan rincian kegiatan:

- a) Penyusunan Program dan Rencana Kerja Teknis/Program (IRSDP, Sekretariat WASAP, Koordinasi Perencanaan Infrastruktur, Sekretariat PPITA)
- b) Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan
- c) Pembinaan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan
- d) Pengadaan Peralatan
- e) Monitoring dan Evaluasi

**GAMBAR 14**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK SEKRETARIAT INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROGRAM**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2015**



## 12) PPK Program Pengelolaan Hibah MCC

Pemerintah Amerika Serikat melalui *Millennium Challenge Corporation* (MCC) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang diwakili Menteri Keuangan telah menandatangani kesepakatan hibah *Millennium Challenge Compact* senilai \$600.000.000 untuk mendukung upaya pengurangan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tanggal 19 November 2011. Dana hibah akan digunakan untuk membiayai tiga proyek yaitu:

### 1. *Green Prosperity Activities*

Proyek ini bertujuan untuk :

- Meningkatkan produktifitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil melalui energi terbarukan.
- Meningkatkan produktifitas dan mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan melalui penyempurnaan perktek-peraktek pemanfaatan lahan dan pengelolaan sumber daya alam.

### 2. *Community-Based Nutrition Activities*

Proyek ini bertujuan untuk Mengurangi dan mencegah berat bayi rendah waktu lahir serta mengurangi tingkat kekerdilan anak dan kekurangan gizi, dan menaikkan pendapatan rumah tangga melalui penghematan biaya, peningkatan produktifitas dan pendapatan.

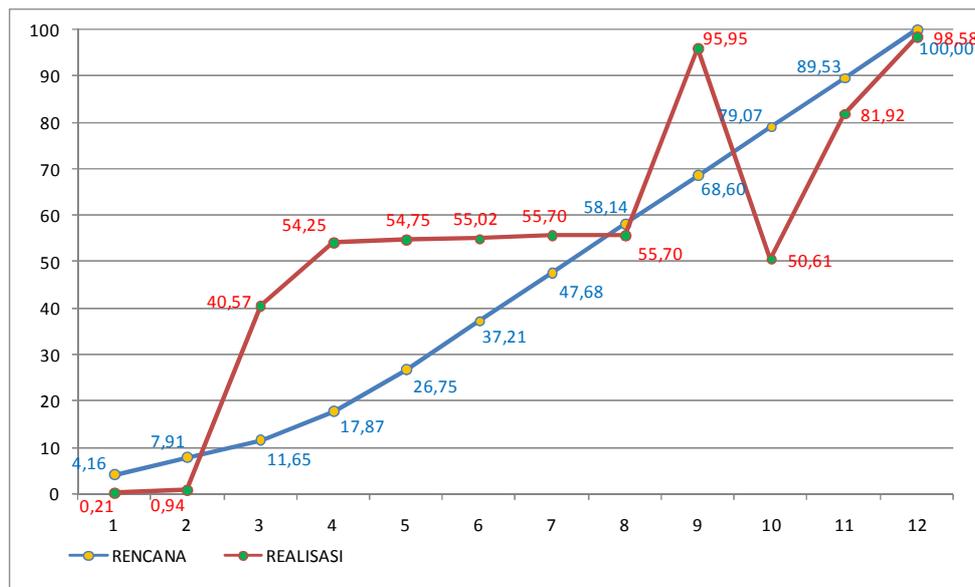
### 3. Procurement Modernization Activities

Proyek ini bertujuan untuk mencapai penghematan biaya pemerintah yang signifikan dari barang dan jasa yang dibeli, dengan menjamin kualitas yang memenuhi kebutuhan publik serta mencapai penyelenggaraan jasa publik sesuai rencana yang ditetapkan.

Sesuai dengan PMK Nomor 124/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah MCC bahwa pelaksanaan anggaran yang berasal dari hibah MCC dialokasikan dalam DIPA Satker Pengelola Hibah MCC. Selain alokasi dari hibah MCC, dalam DIPA Satker Pengelola Hibah MCC juga dialokasikan dana yang bersumber dari Rupiah Murni untuk operasional Satker dan penggantian pajak terkait hibah Program Compact. Pelaksanaan anggaran HLN yang dialokasikan dalam DIPA tersebut menggunakan mekanisme Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL), sedangkan untuk alokasi Rupiah Murni menggunakan mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Alokasi anggaran PPK Pengelolaan Hibah MCC pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 424.000.000.000,-, terdiri dari dana RM sebesar Rp. 13.000.000.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 411.000.000.000,-. Realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan IV mencapai Rp. 418.622.143.879,- (98,73%).

**GAMBAR 15**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH MCC TRIWULAN IV TAHUN 2015**



### 13) Satker Dana Dekonsentrasi Tahun 2015

Dari 34 provinsi pelaksana Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015, sampai dengan Triwulan IV, realisasi anggaran sebesar Rp. 24.588.054.129,- (72,30%).

Beberapa kendala dalam pelaksanaan yang dapat diinventarisasi dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi secara keseluruhan antara lain:

1. Dana dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas hanya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinasi, belum terakomodirnya belanja terkait Jasa Konsultan Pihak ke 3, belanja barang, dan belanja modal.
2. Keterlambatan dalam penerbitan juklak/juknis dekonsentrasi.
3. Ketidaksiapan sistem akuntansi berbasis *accrual* oleh Kemenkeu.
4. Terdapat beberapa kali penundaan kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan dana dekonsentrasi dikarenakan padatnya kegiatan anggota Satker terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi sebagai SKPD.
5. Adanya aturan yang pembatasan kegiatan rapat di luar kantor yang menyebabkan penyerapan dana lebih rendah dari sebelumnya.

Terkait kendala yang dihadapi, berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu :

1. Juklak/juknis dekonsentrasi agar diterbitkan lebih awal, sebelum dimulainya tahun anggaran.
2. Mendorong Kementerian Keuangan untuk mematangkan sistem akuntansi berbasis *accrual* dan memperkecil terjadinya *System Error*.
3. Mengintensifkan koordinasi antar anggota Satker Bappeda Provinsi, terkait dengan penyelesaian kegiatan, penyerapan anggaran, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
4. Lebih mempermudah jalur komunikasi untuk berkonsultasi bagi daerah dengan Sekretariat Dekonsentrasi di Bappenas.
5. Memperkuat koordinasi diantara Kementerian PPN/Bappenas dengan K/L lain yang mengeluarkan regulasi yang berhimpitan.

**TABEL 17**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**SATKER DEKOSENTRASI 2015**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2015**

SATKER	PAGU	REALISASI	%
Provinsi DKI Jakarta	799.291.000	-	-
Prvinsi Jawa Barat	838.291.000	676.632.150	80,72
Provinsi Jawa Tengah	915.691.000	850.851.002	92,92
Provinsi DIY	920.491.000	669.216.303	72,70
Provinsi Jawa Timur	943.291.000	275.877.602	29,25
Provinsi Aceh	1.045.291.000	581.907.742	55,67
Provinsi Sumatera Utara	1.006.891.000	865.284.200	85,94
Provinsi Sumatera Barat	958.891.000	844.343.706	88,05
Provinsi Riau	962.491.000	561.426.500	58,33
Provinsi Jambi	931.291.000	831.602.408	89,30
Provinsi Sumatera Selatan	920.491.000	880.450.314	95,65
Provinsi Lampung	882.091.000	867.142.360	98,31
Provinsi Kalimantan Barat	949.291.000	529.798.174	55,81
Provinsi Kalimantan Tengah	960.691.000	734.001.229	76,40
Provinsi Kalimantan Selatan	961.291.000	760.920.800	79,16
Provinsi Kalimantan Timur	1.006.291.000	706.740.250	70,23
Provinsi Sulawesi Utara	1.079.491.000	1.054.907.170	97,72
Provinsi Sulawesi Tengah	1.080.091.000	1.092.688.000	101,17
Provinsi Sulawesi Selatan	1.008.091.000	94.001.150	9,32
Provinsi Sulawesi Tenggara	1.027.891.000	810.034.800	78,81
Provinsi Maluku	1.190.491.000	1.127.817.948	94,74
Provinsi Bali	976.291.000	825.093.525	84,51
Provinsi NTB	974.491.000	616.255.718	63,24
Provinsi NTT	1.078.291.000	956.942.130	88,75
Provinsi Papua	1.252.891.000	782.522.000	62,46
Provinsi Bengkulu	940.291.000	763.564.350	81,21
Provinsi Maluku Utara	1.167.091.000	1.061.979.300	90,99
Provinsi Banten	823.291.000	481.635.000	58,50
Provinsi Bangka Belitung	913.291.000	573.454.701	62,79
Provinsi Gorontalo	1.063.891.000	1.062.450.550	99,86
Provinsi Kepulauan Riau	955.291.000	807.240.100	84,50
Provinsi Papua Barat	1.400.491.000	805.291.684	57,50
Provinsi Sulawesi Barat	1.066.291.000	1.035.981.263	97,16
Provinsi Kalimantan Utara	1.006.291.000	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>34.006.294.000</b>	<b>24.588.054.129</b>	<b>72,30</b>

Sumber : Ditjen Anggaran, Kem. Keuangan, <http://monev.anggaran.depkeu.go.id/2015>

## B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Untuk mendukung pencapaian sasaran program, pada tahun 2015 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 703.922.236.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 367.666.146.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 336.256.090.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Desember 2015 mencapai Rp. 586.762.489.819,- (83,36%) yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 285.582.491.658,- (77,67%), sedangkan dana PHLN sebesar Rp. 301.179.998.161,- (89,57%).

Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dikelola oleh 5 (lima) PPK di Setmen PPN/Settama Bappenas dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup masing-masing UKE II. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing PPK dapat dilihat pada Tabel 18.

**TABEL 18**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA**  
**TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015**

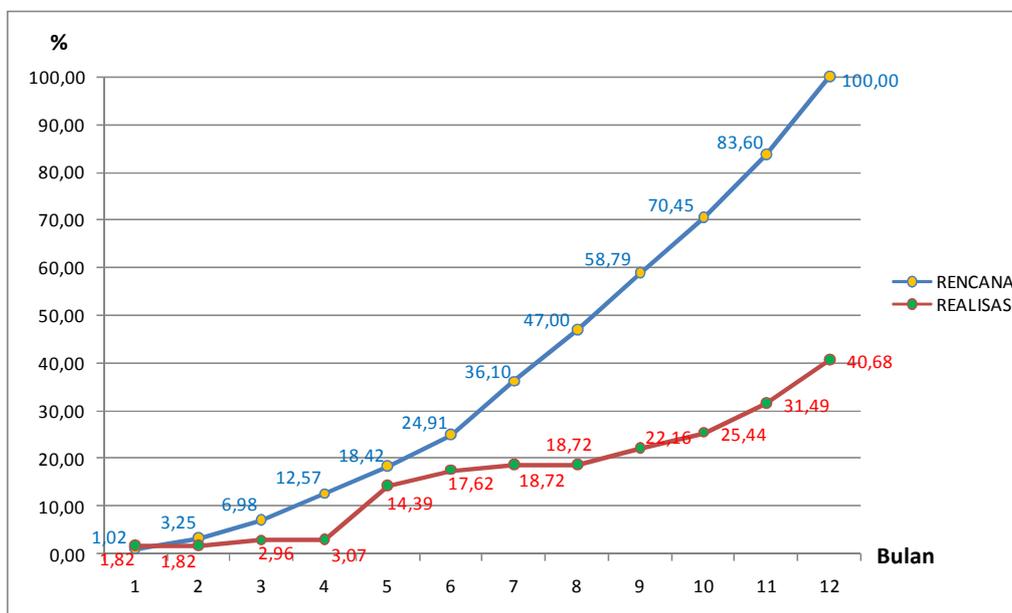
NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
	<b>DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>	<b>367.666.146.000</b>	<b>336.256.090.000</b>	<b>703.922.236.000</b>	<b>285.582.491.658</b>	<b>77,67</b>	<b>301.179.998.161</b>	<b>89,57</b>	<b>586.762.489.819</b>	<b>83,36</b>
1	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS I</b>	<b>51.242.070.000</b>	<b>-</b>	<b>51.242.070.000</b>	<b>20.847.037.106</b>	<b>40,68</b>	<b>-</b>		<b>20.847.037.106</b>	<b>40,68</b>
	a Sekretariat PPK Program DM I	48.512.070.000	-	48.512.070.000	18.340.314.589	37,81			18.340.314.589	37,81
	b Biro Renortala	2.730.000.000	-	2.730.000.000	2.506.722.517	91,82			2.506.722.517	91,82
2	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS II</b>	<b>34.543.362.000</b>	<b>-</b>	<b>34.543.362.000</b>	<b>26.818.595.404</b>	<b>77,64</b>	<b>-</b>		<b>26.818.595.404</b>	<b>77,64</b>
	a Sekretariat PPK Program DM II	379.810.000	-	379.810.000	282.578.091	74,40			282.578.091	74,40
	b Staf Ahli	9.250.000.000	-	9.250.000.000	4.964.548.033	53,67			4.964.548.033	53,67
	c Pusdatinrenbang	9.360.300.000	-	9.360.300.000	7.796.993.030	83,30			7.796.993.030	83,30
	d Biro Humas dan TU Pimpinan	7.760.190.000	-	7.760.190.000	6.976.453.918	89,90			6.976.453.918	89,90
	e Biro SDM	6.293.062.000	-	6.293.062.000	5.345.702.978	84,95			5.345.702.978	84,95
	f Biro Hukum	1.500.000.000	-	1.500.000.000	1.452.319.354	96,82			1.452.319.354	96,82
3	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS III</b>	<b>225.683.721.000</b>	<b>-</b>	<b>225.683.721.000</b>	<b>186.484.159.827</b>	<b>82,63</b>	<b>-</b>		<b>186.484.159.827</b>	<b>82,63</b>
	a Biro Umum/Sekretariat	225.683.721.000	-	225.683.721.000	186.484.159.827	82,63			186.484.159.827	82,63
4	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS IV</b>	<b>54.756.993.000</b>	<b>336.256.090.000</b>	<b>391.013.083.000</b>	<b>50.352.699.321</b>	<b>91,96</b>	<b>301.179.998.161</b>	<b>89,57</b>	<b>351.532.697.482</b>	<b>89,90</b>
	a Pusbindiklatren	54.756.993.000	336.256.090.000	391.013.083.000	50.352.699.321	91,96	301.179.998.161	89,57	351.532.697.482	89,90
5	<b>PPK DANA OPERASIONAL MENTERI</b>	<b>1.440.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.440.000.000</b>	<b>1.080.000.000</b>	<b>75,00</b>	<b>-</b>		<b>1.080.000.000</b>	<b>75,00</b>

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

### 1) PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas I

Alokasi anggaran pada PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas I sebesar Rp. 51.242.070.000,-, sampai dengan Triwulan IV 2015 dana yang sudah diserap sebesar Rp. 20.847.037.106,- (40,68%). Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 19 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 16.

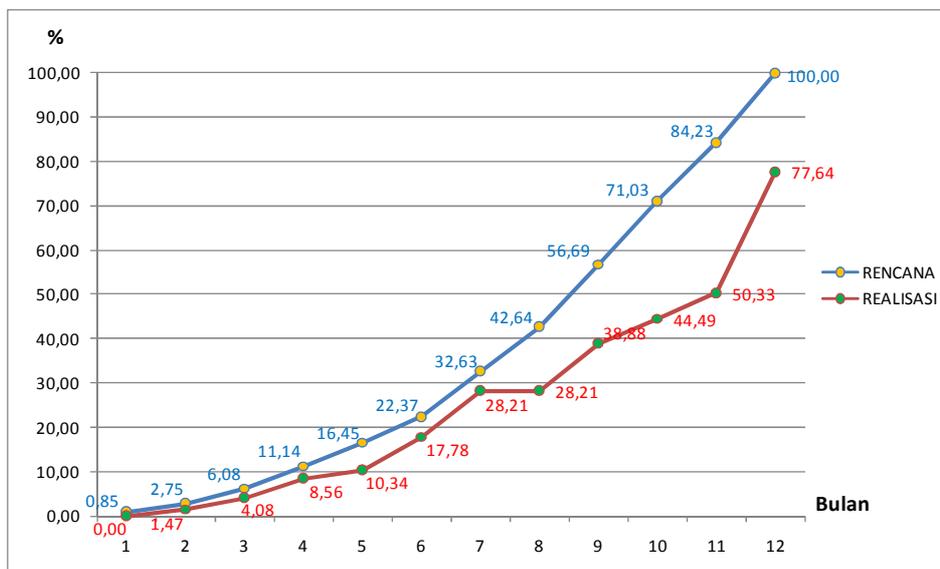
**GAMBAR 16**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DUKUNGAN MANAJEMEN I**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2015**



### 2) PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas II

Alokasi anggaran pada PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas II sebesar Rp. 34.543.362.000,- dan telah ditarik Rp. 26.818.595.404,- (77,64%). PPK DM II mengkoordinasikan kegiatan pada Staf Ahli, Pusat Data Informasi Perencanaan Pembangunan, Biro Humas dan TU Pimpinan, Biro SDM, dan Biro Hukum. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 18 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 17.

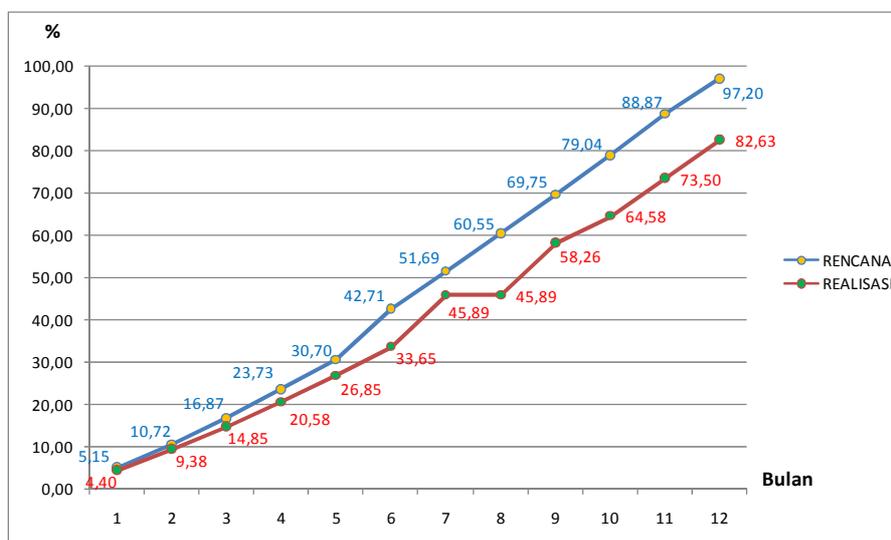
**GAMBAR 17**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DUKUNGAN MANAJEMEN II TRIWULAN IV TAHUN 2015**



**3) PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas III**

Alokasi anggaran pada PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas III sebesar Rp. 225.683.721.000, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 186.484.159.827,- (82,63%). Anggaran PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas III sebagian besar digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil.

**GAMBAR 18**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DUKUNGAN MANAJEMEN III TRIWULAN IV TAHUN 2015**



#### 4) **PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas IV**

Alokasi anggaran pada PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas IV sebesar Rp. 391.013.083.000,- yang terdiri dari Rp 54.756.993.000,- dana RM, dan dan PLN sebesar Rp. 336.256.090.000. Realisasi anggaran sebesar Rp. 351.532.697.482,- (89,90%). Berikut anggaran PLN yang dikelola oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana:

##### **a. *Professional Human Resources Development Project (PHRDP) III***

Dibiayai oleh JICA (Jepang) dengan alokasi tahun 2015 sebesar Rp JPY 116,667 juta (Rp 14 M). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas administrasi pada instansi yang berada di Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah dalam rangka memfasilitas proses desentralisasi dengan melaksanakan Program Pendidikan di Luar Negeri dan Dalam Negeri baik di Indonesia maupun di Jepang yang dikhususkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari seluruh Indonesia, terutama mereka yang bekerja berhubungan dengan Perencanaan Publik & Keuangan Publik. Sasaran dari kegiatan ini sebagai Pengembangan SDM PNS secara professional di Indonesia.

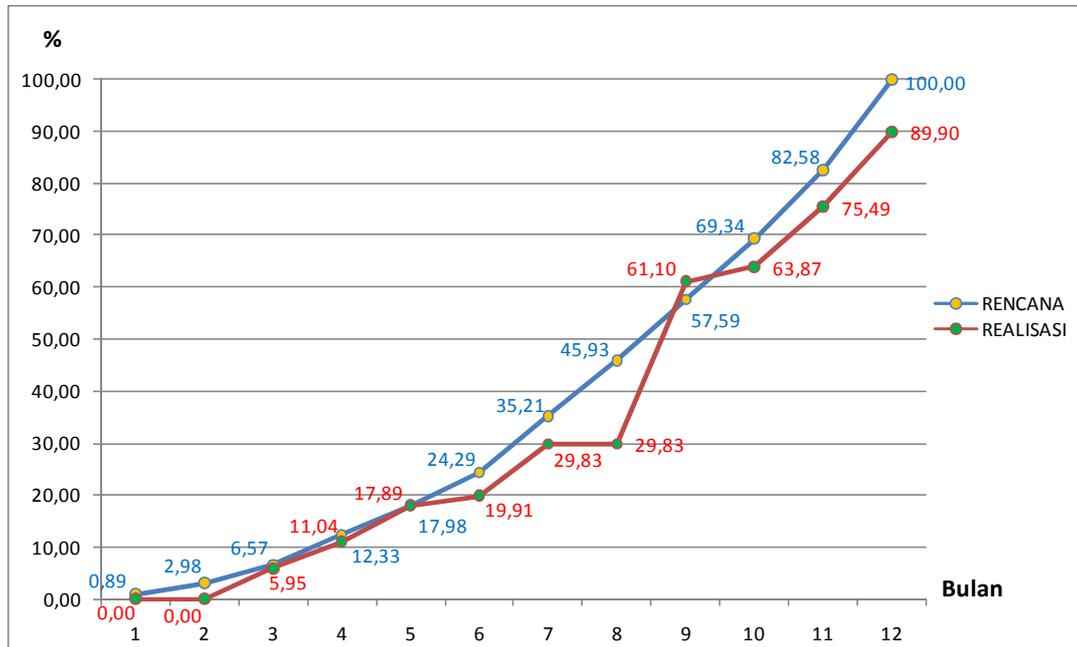
##### **b. *Professional Human Resources Development (PHRD) IV***

Dibiayai oleh JICA (Jepang) dengan alokasi anggaran tahun 2015 sebesar JPY 901.321,1 juta. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka memfasilitasi proses desentralisasi melalui pengembangan sumber daya aparatur perencana seluruh Indonesia dengan melaksanakan Program gelar dan program non-gelar baik di Indonesia maupun di Jepang.

##### **c. *Scholarship Program for Strengthening Reforming Institutions (SPIRIT)***

Dibiayai oleh *World Bank* (8010-ID). Dengan alokasi anggaran tahun 2015 sebesar USD 24.306.000. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas *Participating Agency* melalui: (1) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/SDM dengan mengembangkan keterampilan teknis, manajerial, dan kepemimpinan aparat pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi institusi serta; (2) Peningkatan kapasitas SDM dalam melaksanakan reformasi birokrasi di instansi pusat.

**GAMBAR 19**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK DUKUNGAN MANAJEMEN IV**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2015**



**5) PPK Dana Operasional Menteri**

Alokasi anggaran pada PPK Dana Operasional Menteri (DOM) sebesar Rp 1.440.000.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.080.000.000,- (75,00%). Penggunaan anggaran pada PPK DOM disesuaikan dengan kebutuhan dan operasional Menteri sampai akhir tahun 2015.

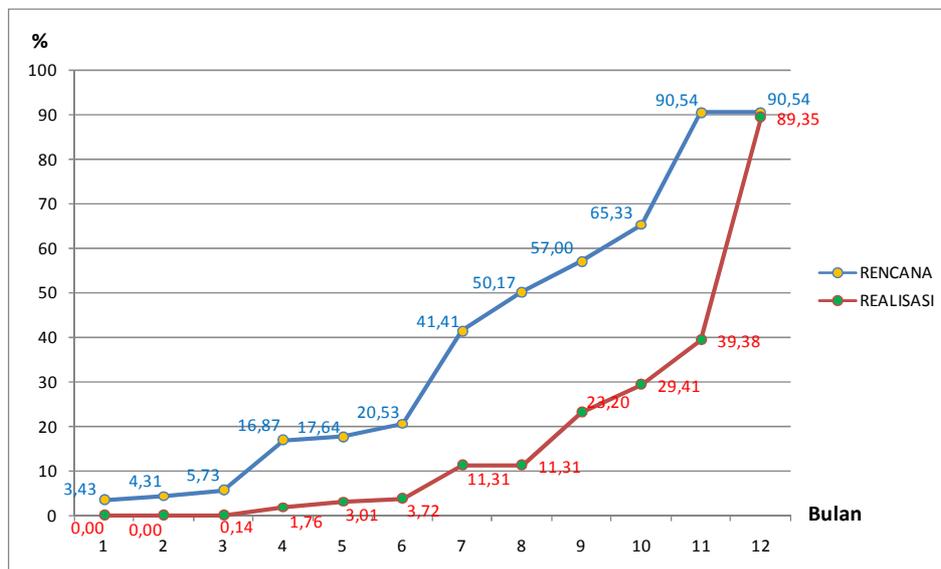
**C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas**

Alokasi anggaran tahun 2015 pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas sebesar Rp. 40.000.000.000,- dikelola oleh PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 35.738.855.782,- (89,35%).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur termasuk penyediaan sistem informasi perencanaan pembangunan nasional, pengembangan sistem data/informasi perencanaan pembangunan, dan sistem data/informasi dalam pengelolaan aset (Barang Milik Negara). Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- 2) Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional.
- 3) Peningkatan Kualitas Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional.

**GAMBAR 20**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR BAPPENAS**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2015**



**D. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas**

Alokasi anggaran Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas sebesar Rp. 5.275.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.436.970.429,- (84,11%) yang dikelola oleh PPK Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas. Anggaran program ini dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup masing-masing UKE II.

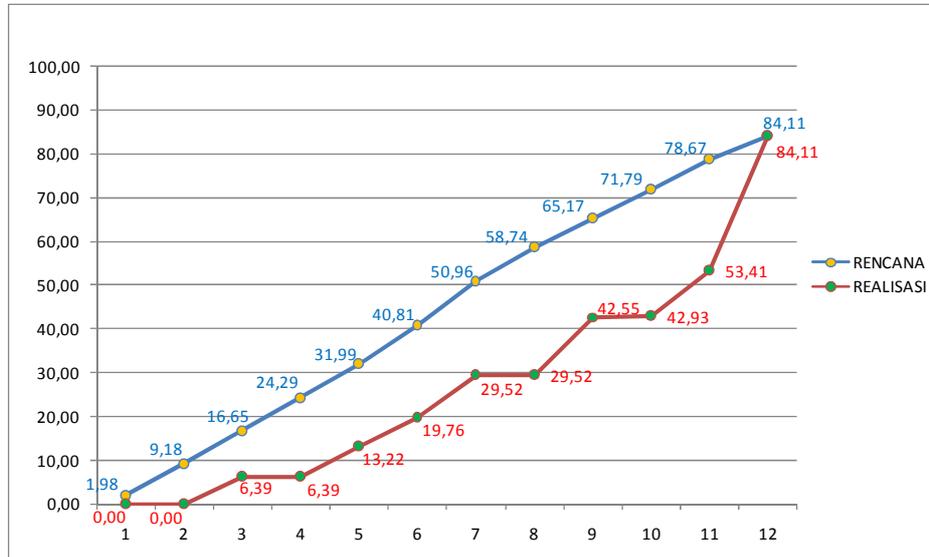
Secara rinci realisasi penyerapan anggaran pada setiap unit kerja dapat dilihat pada Tabel 19 dan perkembangan realisasi setiap bulan pada Gambar 15.

**TABEL 19**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS**  
**APARATUR BAPPENAS TRIWULAN IV TAHUN 2015**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
	<b>PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR</b>	5.275.000.000	-	5.275.000.000	4.436.970.429	84,11	-		4.436.970.429	84,11
a	Inspektorat Utama/Sekretariat PPK	275.000.000		275.000.000	224.481.380	81,63			224.481.380	81,63
b	Inspektorat Bidang Administrasi Umum	3.000.000.000		3.000.000.000	2.492.807.789	83,09			2.492.807.789	83,09
c	Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan	2.000.000.000		2.000.000.000	1.719.681.260	85,98			1.719.681.260	85,98

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

**GAMBAR 21**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**PPK PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAWASAN AKUNTABILITAS**  
**APARATUR BAPPENAS TRIWULAN IV TAHUN 2015**



## **BAB IV KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan Desember 2015 (Triwulan IV), dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 1.519.246.983.000,- terdiri dari dana RM sebesar Rp. 659.158.063.000,-, dan PHLN sebesar Rp. 860.088.920.000,-. Dari sejumlah dana tersebut, realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2015 sebesar Rp. 1.320.680.155.872,- (86,993%), yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 541.694.140.736,- (82,18%), dan dana PHLN sebesar Rp. 778.986.015.136,- (90,57%).
2. Realisasi penyerapan anggaran Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan Triwulan IV cukup rendah, disebabkan antara lain:
  - 1) Adanya pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar kantor yang menyebabkan realisasi kegiatan unit perlu direvisi secara substansial berdasarkan :
    - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.
    - b. Memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 472/Ses/04/2015 Tanggal 15 April 2015 Tentang Tata kelola Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor. Peraturan tersebut bertujuan agar unit tetap dapat berkinerja tanpa tergantung dengan aturan Menpan tersebut.
  - 2) Waktu pengesahan atas pencairan anggaran yang dibiayai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), membutuhkan waktu yang relative lama.
  - 3) Perubahan Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas di tingkat Eselon I sesuai dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Adanya Rapat Koordinasi percepatan penyerapan anggaran yang dipimpin oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas secara intensif.
2. Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada saat proses perencanaan, kepada semua unit kerja pelaksana kegiatan dan PPK disarankan:
  - a. Melakukan penyesuaian kegiatan atau merealokasi anggaran belanja rapat di luar kantor ke belanja lainnya sesuai kebutuhan.
  - b. Perlu meningkatkan koordinasi dengan KPPN Kementerian Keuangan terkait penerbitan SP3.
  - c. Melaksanakan segera atau mempercepat kegiatan sesuai dengan SK yang sudah direvisi.
2. Penyampaian laporan data realisasi penyerapan anggaran harus tetap konsisten berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setiap bulannya (sampai dengan akhir bulan).
3. Perlunya konsep perencanaan yang matang, jelas dan terukur dalam penggunaan anggaran. Sehingga penggunaan anggaran akan tepat sasaran dan indikator kinerja yang direncanakan akan tercapai.

## Matriks Permasalahan dan Tindak Lanjut Tahun 2015

NO	PPK PROGRAM/KEDEPUTIAN/ UNIT KERJA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	PPK Program Dukungan Manajemen I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran pelaksanaan Rapat Kerja Kementerian PPN/Bappenas dialokasikan untuk 3 (tiga) kali pelaksanaan, namun sampai dengan saat ini Rapat Kerja terkendala oleh kondisi internal Kementerian PPN/Bappenas.</li> <li>2. Sosialisasi RPJMN 2015 – 2019 ke beberapa provinsi yang direncanakan akan melibatkan pimpinan/anggota Komisi XI DPR RI terlaksana, namun tanpa keikutsertaan Pimpinan/Anggota Komisi XI DPR RI.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Rapat Kerja Kementerian PPN/Bappenas akan dilaksanakan pada akhir tahun.</li> <li>2. Sosialisasi RPJMN 2015 – 2019 akan lebih banyak melibatkan Pejabat/Pegawai Kementerian PPN/Bappenas.</li> </ol>
2	PPK Program Dukungan Manajemen II	Kegiatan Staf Ahli SDM-PK yang tidak jadi dilaksanakan sehingga tidak ada penyerapan anggaran.	Merealisasi anggaran Kegiatan Staf Ahli SDM-PK
3	PPK Program Dukungan Manajemen III	lambatnya proses administrasi dan sinkronisasi Tunjangan Kinerja antara Bagian Keuangan Biro Umum, Biro SDM, dan KPPN Kementerian Keuangan.	Biro Umum, Biro SDM, dan KPPN Kementerian Keuangan diharapkan lebih meningkatkan koordinasi terkait tunjangan kinerja.
4	PPK Program Dukungan Manajemen IV	1. Adanya beberapa peserta beasiswa luar negeri yang masih belum memiliki paspor dinas sehingga tidak bisa melanjutkan program beasiswanya;	1. Penerima beasiswa luar negeri dianjurkan membuat surat pernyataan, Kapusbindiklatren meminta dispensasi Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar siswa dapat menggunakan paspor hijau dengan catatan

NO	PPK PROGRAM/KEDEPUTIAN/ UNIT KERJA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Terhambatnya pengadaan konsultan baru untuk pengelolaan Beasiswa PHRD IV;</li> <li>3. Terhambatnya pengisian Rekening Khusus PHRD III dikarenakan adanya selisih bukti pengeluaran (SOE) PHRD III;</li> <li>4. Kurangnya ketersediaan dana rekening khusus akibat terlambatnya revisi eksternal DIPA.</li> </ol>	<p>telah mendapatkan surat tugas dari Setneg;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menggunakan jasa konsultan sementara dengan cara memperpanjang kontrak konsultan sebelumnya;</li> <li>3. Mengadakan rapat konsolidasi laporan bukti pengeluaran dengan Kementerian Keuangan dan pihak JICA;</li> <li>4. Mendorong percepatan terbitnya revisi eksternal DIPA</li> </ol>
5	PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Kendaraan Dinas Eselon I dibatalkan. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Langkah-langkah Penghematan Dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.</li> <li>2. Batalnya renovasi gedung di JL. Sunda Kelapa No. 9</li> <li>3. Adanya kekosongan jabatan Eselon II dan II yang menyebabkan terganggunya pengambilan kebijakan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan kendaraan dinas ditunda dan alokasi anggaran kegiatan dialihkan ke pengadaan lainnya.</li> <li>2. Penyusunan ulang dokumen perencanaan gedung dan pengalihan beberapa pekerjaan.</li> </ol>
6	PPK Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembatasan jumlah pegawai yang dapat ditarik honor output kegiatan</li> <li>2. Pembatasan pelaksanaan rapat di luar kantor (konsinyering hotel)</li> <li>3. Belum definitifnya pejabat Eselon II yang mengakibatkan kinerja tidak maksimal</li> <li>4. Kurangnya informasi terkait <i>deadline</i> revisi anggaran.</li> </ol>	

NO	PPK PROGRAM/KEDEPUTIAN/ UNIT KERJA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
7	PPK Deputy Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan realisasi hibah langsung yang belum dapat dilakukan karena tenggat waktu pencatatan di KPPN dan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu yang terlampaui dan belum dibuka kembali.</li> <li>2. Konfirmasi penambahan alokasi kegiatan prakarsa strategis (Revolusi Mental dan Indek Pembangunan Masyarakat) dan quick win (Perlindungan Anak) di pertengahan tahun yang menyebabkan kegiatan terlambat dieksekusi</li> <li>3. Adanya perubahan sistem aplikasi penggantian nama rekening Bendahara BPP SDM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan Hibah yang telah diproses ke KPPN diharapkan tetap diperhatikan dan didorong pada awal tahun 2016, sehingga diharapkan dapat mendukung realisasi penyerapan penyerapan anggaran. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pencatatan BMN yang diperoleh pada tahun 2015 perlu dikoordinasikan lebih lanjut, khususnya yang bersumber dari HLN.</li> </ul> </li> <li>2. Mendorong pelaksana kegiatan UKE I/II di lingkungan Deputy Bidang PMMK untuk melakukan optimalisasi pertanggungjawaban kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Berhati-hati agar tidak sampai terjadi pagu minus.</li> <li>– Sekretariat PPK, BPP, PPBJ, dan PPHP akan berupaya memfasilitasi pelaksana kegiatan pelaksanaan UKE I/II secara optimal.</li> </ul> </li> <li>3. Persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2016. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 sebelum 31 Desember 2015.</li> <li>– Penyesuaian kegiatan dengan</li> </ul> </li> </ol>

NO	PPK PROGRAM/KEDEPUTIAN/ UNIT KERJA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		<p>4. Pelaksanaan Kegiatan UKE I/II yang belum dapat optimal, antara lain karena restrukturisasi Bappenas (Menteri, Eselon 1, dan Eselon 2)</p>	<p>perubahan struktur Bappenas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP PPK PPN V dengan menggunakan mekanisme Reward &amp; Punishment.</li> </ul> <p>4. Biro Renortala diharapkan dapat menyusun Pedoman Umum dan Petunjuk Operasional Kegiatan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di lingkungan KemenPPN/Bappenas. Penyesuaian kegiatan dengan perubahan struktur Bappenas.</p> <p>SOP PPK PPN V dengan menggunakan mekanisme Reward &amp; Punishment.</p>
8	PPK Deputi Polhukhankam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inpres Stranas PPK yaitu Inpres Nomor &amp; Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi baru terbit bulan Mei 2015.</li> <li>2. Akhir Mei baru turun revisi DIPA untuk kegiatan-kegiatan koordinasi strategis sehingga belum ada realisasi penyerapan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Segera melaksanakan kegiatan koordinasi dengan mitra K/L dalam rangka penajaman aksi, monitoring, dan penyusunan aksi tahun mendatang.</li> <li>2. Segera merealisasikan rencana-rencana kegiatan seperti: perjalanan ke daerah, seminar/sosialisasi/ rapat koordinasi, dan pengadaan-pengadaan (konsultan, jasa, persediaan, modal)</li> </ol>

NO	PPK PROGRAM/KEDEPUTIAN/ UNIT KERJA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		3. Adanya pergantian pimpinan unit kerja eselon II (Direktur). 4. Adanya SE Menpan dan RB tentang Pembatasan Rapat di Hotel.	3. Segera mematangkan konsep untuk dilakukan finalisasi. 4. Direktur Analisa PP mengirim memo mengusulkan kemudahan melakukan rapat di hotel untuk koordinasi lintas K/L.
9	PPK Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Adanya beberapa kegiatan yang terlambat dalam pelaksanaannya, dan adanya SE dari Kementerian PANRB terkait pembatasan kegiatan rapat di luar kantor	Anggaran kegiatan rapat diluar kantor direalokasi ke dalam kegiatan lain
10	PPK Deputi Ekonomi	1. Adanya perubahan PMK yang mengatur pengendalian jumlah honorarium yang bisa diterima oleh anggota Tim Kegiatan pada Bulan Maret 2015, perubahan status CPNS menjadi PNS, pindahnya pejabat karena lelang jabatan serta adanya PNS yang tugas belajar dan pulang belajar sehingga mengharuskan adanya revisi SK. 2. adanya penambahan kegiatan strategis di bulan Juni (Techno Park, Kedalaman Antar Sektor Ekonomi dan FMS sehingga beberapa kegiatan baru memulai kontrak tenaga ahli di pertengahan tahun 2015  3. Adanya SE dari Men PAN & RB yang membatasi kegiatan rapat di luar kantor (dalam kota dan luar kota) sehingga banyak menyebabkan proses revisi RAB	1. Segera merevisi SK Tim Kegiatan dan melaksanakan kegiatan sesuai SK yang sudah ditetapkan.  2. Segera melakukan proses pengajuan perubahan SK kegiatan, dan segera melaksanakan kegiatan strategis dengan penyesuaian jadwal sampai dengan akhir tahun 2015 3. Merealokasi anggaran rapat di luar kantor ke kegiatan lain
11	PPK Deputi Kemaritiman dan SDA	1. Tidak terserapnya jasa profesi karena rapat/fgd/seminar yang tidak jadi terlaksana 2. Tidak terserapnya perjalanan meeting dalam kota yang telah dianggarkan pada RAB namun pada saat realisasi terhabat dengan peraturan untuk mengadakan meeting di luar kantor khusus hotel	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik

NO	PPK PROGRAM/KEDEPUTIAN/ UNIT KERJA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		<p>yang pada tahun sebelumnya dapat dilakukan untuk FGD dan Seminar(ketersediaan ruang rapat dikantor terbatas)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tidak terserapnya perjalanan meeting dalam kota yang telah dianggarkan pada RAB namun pada saat realisasi terhabat dengan peraturan untuk mengadakan meeting di luar kantor khusus hotel yang pada tahun sebelumnya dapat dilakukan untuk FGD dan Seminar(ketersediaan ruang rapat dikantor terbatas), dan Tidak terserapnya jasa konsultan dikarenakan kualifikasi pelamar tidak memenuhi persyaratan sehingga jauh dari rate yang telah ditentukan</li> <li>4. Tidak terserapnya perjalanan meeting dalam kota yang telah dianggarkan pada RAB namun pada saat realisasi terhabat dengan peraturan untuk mengadakan meeting di luar kantor khusus hotel yang pada tahun sebelumnya dapat dilakukan untuk FGD dan Seminar(ketersediaan ruang rapat dikantor terbatas)</li> <li>5. Tidak terserapnya perjalanan meeting dalam kota yang telah dianggarkan pada RAB namun pada saat realisasi terhabat dengan peraturan untuk mengadakan meeting di luar kantor khusus hotel yang pada tahun sebelumnya dapat dilakukan untuk FGD dan Seminar(ketersediaan ruang rapat dikantor terbatas), Tidak terserapnya satu perjalanan luar kota dikarenakan bencana alam Gn. Rinjani (NTB), Tidak terserapnya belanja bahan</li> <li>6. Tidak terserapnya perjalanan meeting dalam kota yang telah dianggarkan pada RAB namun pada saat realisasi terhabat dengan peraturan untuk mengadakan meeting di luar kantor khusus hotel yang pada tahun sebelumnya dapat dilakukan untuk FGD dan Seminar(ketersediaan ruang rapat dikantor terbatas)</li> <li>7. Tidak terserapnya jasa konsultan dikarenakan kualifikasi pelamar tidak memenuhi persyaratan sehingga jauh dari rate yang telah ditentukan</li> <li>8. Banyaknya perubahan PMK yang mengharuskan adanya Revisi Anggaran</li> <li>9. Adanya Pagu Minus</li> <li>10. Pencairan UP dan TUP yang terlambat</li> <li>11. Banyaknya berkas pertanggungjawaban yang belum lengkap</li> </ol>	

NO	PPK PROGRAM/KEDEPUTIAN/ UNIT KERJA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
12	PPK Deputi Sarana dan Prasarana	Masih menunggu terbitnya SP3. Waktu pengesahan atas pencairan anggaran yang dibiayai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), membutuhkan waktu yang relative lama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempercepat proses kontrak dan administrasi oleh pihak konsultan.</li> <li>2. Berkoordinasi dengan bagian verifikasi untuk mempercepat SP3.</li> <li>3. Berkoordinasi dengan pihak perusahaan konsultan, untuk dapat menagihkan sesuai dengan kontrak.</li> </ol>
13	PPK Deputi Pengembangan Regional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Penambahan Ketentuan Pelaksanaan Paket meeting dalam / luar kota yaitu surat ketidaktersediaan ruangan rapat di instansi lain</li> <li>2. Direktorat KKDT sebagai Panitia Penyelenggara Musrenbang Tahun 2015, sehingga sangat terbatas untuk melakukan kegiatan tupoksi Direktorat;</li> <li>3. Peraturan pembatasan perjalanan dinas, agar dilakukan seefisien mungkin;</li> <li>4. Perubahan nomor rekening bendahara, sehingga pencairan UP terhambat.</li> <li>5. Untuk kegiatan HLN (People Center Development Program/PCDP), pencantuman dalam DIPA Bappenas baru disahkan tanggal 25 Mei 2015 (Revisi-3), karena Project Document baru di tanda tangani pihak UNDP tanggal 8 April 2015. Realisasi PHLN yang sudah dilaksanakan sebesar 85.01% (Rp. 566.474.486) akan tetapi belum dilaporkan pencatatannya (SP2HL) sehingga pencatatan dalam DIPA Bappenas untuk penyerapan s.d Juni masih nihil (Closing Date 31 Juli 2015)</li> <li>6. Adanya perubahan SOTK mitra K/L menyebabkan perlunya revisi SK kegiatan koordinasi strategis khususnya pada keanggotaan mitra K/L sesuai dengan SOTK baru</li> <li>7. Adanya beberapa "penugasan tambahan" yang terkadang mengganggu pelaksanaan kegiatan rutin direktorat seperti pelaksanaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memprioritaskan rapat internal dalam format rapat di luar jam kantor (RDK)</li> <li>2. Perjalanan dinas ke daerah disertai dengan pelaksanaan FGD di daerah dengan mengundang beberapa stakeholder di daerah dan narasumber.</li> <li>3. Mengadakan pertemuan dengan mengundang narasumber dari daerah dengan menanggung seluruh pembiayaan.</li> <li>4. Melakukan revisi anggaran (khususnya internal) ke beberapa mata anggaran strategis dapat dilakukan penyerapan dengan cepat.</li> <li>5. Melakukan rapat/seminar/FGD/konsinyasi di hotel</li> <li>6. Mengajukan kegiatan yang dapat</li> </ol>

NO	PPK PROGRAM/KEDEPUTIAN/ UNIT KERJA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		<p>penyelenggaraan musrenbang, temu konsultasi triwulanan dll.</p> <p>8. Terlambatnya DIPA kegiatan Koordinasi Strategis, Prakarsa Strategis, dan Quickwins</p> <p>9. Terkait dengan penyerapan PHLN, permasalahan yang ada terkait dengan terlambatnya proses lelang konsultan pendamping di Bappenas yang baru selesai dilakukan bulan September 2015</p> <p>10. Penyesuaian waktu dengan BPS menjadi kendala dalam percepatan penyusunan Indeks Pembangunan Desa.</p> <p>11. Dalam pelaksanaan kegiatan Kajian terdapat kesulitan dalam memperoleh: (1) literatur yang terkait dengan penyusunan indeks Keterkaitan Kota Desa; (2) data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan indeks.</p>	<p>dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengajuan LS dan LS Reimburse</p> <p>7. Pelaksanaan kegiatan FGD diluar kota dapat mengundang direktorat lain yang terkait secara substansi sehingga dapat membantu penyerapan.</p> <p>8. Hasil sementara Kegiatan Kajian Pengembangan Wilayah melalui Kawasan Strategis menunjukkan bahwa permasalahan hukum dan penguasaan tanah di lokasi kawasan strategis menjadi hambatan pengembangan kawasan strategis dalam pengembangan wilayah. Sehingga kegiatan ini dapat melibatkan Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal dan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan.</p> <p>9. Meningkatkan kualitas data dan informasi di tingkat kabupaten/kota serta desa melalui pelaksanaan konsinyasi bersama dengan Direktorat Otonomi Daerah dan Direktorat Perkotaan dan Perdesaan</p>

NO	PPK PROGRAM/KEDEPUTIAN/ UNIT KERJA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
14	PPK Deputi Pendanaan Pembangunan	Adanya aturan yang ketat (pembatasan) kegiatan rapat di luar kantor (konsinyering) yang menyebabkan penundaan/pembatalan kegiatan tersebut, serta SK Menteri pada kegiatan Koordinasi Strategis KSST belum terbit	
15	PPK Deputi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya perencanaan</li> <li>2. Terlambatnya kebijakan pengaturan penganggaran internal sehingga mempengaruhi <i>time schedule</i> yang telah ditentukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya <i>framework/time schedule</i> dari masing-masing kegiatan</li> <li>2. Perlu adanya pedoman proses pencairan, seperti : <ul style="list-style-type: none"> <li>– RDK, adanya multi tafsir antara Biro Renortala, Unit Kerja, Inspektorat dan Biro SDM dalam proses pencairan (Kehadiran)</li> <li>– Standar biaya transport perjalanan dinas melalui jalur darat (Banten, Bandung, dll)</li> </ul> </li> <li>3. Perlu adanya komitmen/dorongan dari UKE I dan UKE II dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan <i>time schedule</i> yang ditentukan</li> </ol>

NO	PPK PROGRAM/KEDEPUTIAN/ UNIT KERJA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
16	PPK Prog. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan konsultan dengan mekanisme penarikan langsung proses keluar SP3 membutuhkan waktu yang lama, sampai dengan Desember 2015 jumlah SPP/WA yang belum terbit SP3 sejumlah Rp. 830,795,000.</li> <li>2. Konsultan IME-DISMP sudah melaksanakan kegiatan tapi belum mengajukan pembayaran bulan April s.d Desember 2015 sebesar Rp. 895.000.000.</li> <li>3. Honor kegiatan Rawa dan Koordinasi Strategis belum dipertanggung jawabkan karena adanya restrukturisasi organisasi di beberapa Kementerian lain, sebesar Rp. 534.150.000,-.</li> <li>4. Belanja Bahan yang di rencanakan pada masing-masing kegiatan saat ini sebagian besar disediakan oleh Biro Umum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan Bagian Verikasi Anggaran Biro Umum dan KPPN untuk mempercepat proses terbitnya SP3.</li> <li>2. Mendorong pihak konsultan untuk mengajukan proses pembayaran.</li> <li>3. Koordinasi dengan Instansi terkait untuk mengetahui nama dan jabatan penerima honor.</li> <li>4. Melakukan revisi internal kegiatan untuk penyesuaian kegiatan dan anggaran.</li> </ol>
17	PPK IRSDP	Adanya beberapa kegiatan yang dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri yang hingga saat ini belum terbit SP3 dari KPPN Kementerian Keuangan	Diperlukan koordinasi dengan pihak KPPN Kementerian Keuangan
18	PPK MCC	1. Penyesuaian penganggaran hibah MCC dengan DIPA dalam penggunaan akun belanja	1. Telah dilakukan proses persandingan Akun MCA-Indonesia (Standar USA) dengan Akun Pemerintah Indonesia (berdasarkan PB No. 80 Tahun 2011). Satker Pengelola Hibah MCC sudah mengajukan perubahan atau revisi DIPA 2015 dengan menyesuaikan AKUN belanja, dengan demikian, semua pengeluaran yang dibiayai oleh Hibah MCC akan disahkan dalam bentuk SPHL dengan rincian mata akun anggaran yang telah

NO	PPK PROGRAM/KEDEPUTIAN/ UNIT KERJA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		2. Belum adanya realisasi untuk akun belanja 526xxx (Belanja barang untuk diserahkan kepada Pemda/masyarakat)	d disesuaikan. 2. Penghapusan akun 526xxx didalam RKA-KL TA 2015.
19	PPK ICCTF	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Satker ICCTF baru dimulai di bulan Mei, sehingga butuh waktu untuk <i>set up</i> anggaran dan perangkat satker</li> <li>2. Kegiatan Proyek Skala Kecil ICCTF termasuk baru di Bappenas, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses perencanaan, evaluasi dan pertanggung jawaban agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> <li>3. Swakelola Tipe 2 dan tipe 3 merupakan hal baru di Bappenas, bagian verifikasi membutuhkan waktu untuk memastikan dokumen atau prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Banyaknya Aplikasi yang harus diisi untuk Pertanggung jawaban ke Verifikasi maupun ke KPPN yang menyita banyak waktu dalam pelaporan dan pencairan</li> <li>4. Proses pengadaan konsultan membutuhkan waktu lama.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi Intensif dengan semua pihak terkait</li> <li>2. Melakukan reviu terhadap dokumen pendukung yang diberikan oleh mitra pelaksana</li> <li>3. Menyusun panduan sebagai acuan pelaksanaan Proyek Skala Kecil ICCTF"</li> <li>4. Konsultasi ke KPPN, LKPP, dan pihak-pihak terkait di Bappenas</li> <li>5. Mengingatkan kembali issue-issue yang menjadi kendala dan solusinya."</li> <li>6. Proses penginputan dilakukan secepatnya agar tidak menumpuk dan jika diperlukan menambah staff untuk input berkas pertanggungjawaban ke aplikasi - aplikasi tersebut</li> <li>7. Menambah staff untuk pengurusan kontrak - kontrak konsultan tersebut.</li> </ol>